



Laporan Baseline

Sumba, Nusa Tenggara Timur

Februari 2019



INOVASI – Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia

Ratu Plaza Office Tower Lantai 19

Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270

Indonesia

Tel : (+6221) 720 6616 ext. 304

Fax : (+6221) 720 6616

<http://www.inovasi.or.id>

Februari 2019

Foto sampul oleh Palladium

Pemerintah Australia dan Indonesia bermitra dalam Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI). INOVASI berusaha memahami cara meningkatkan hasil pembelajaran siswa di berbagai sekolah dan kabupaten di seluruh Indonesia dalam hal literasi dan numerasi. Fase pertama program ini (AUD \$49 juta) telah dimulai sejak bulan Januari 2016 dan akan berlangsung hingga Desember 2019. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, INOVASI telah membentuk kemitraan dengan 12 kabupaten di: Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur

INOVASI merupakan Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia – Dikelola oleh Palladium.



info@inovasi.or.id



www.inovasi.or.id



www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP

Laporan Baseline

Sumba, Nusa Tenggara Timur

Februari 2019

Isi

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	5
DAFTAR AKRONIM	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
1. PENGANTAR	13
1.1 LATAR BELAKANG	13
1.2 TUJUAN DAN SASARAN	14
2. METODOLOGI	15
2.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	15
2.2 PENGATURAN DAN PESERTA.....	15
2.3 ANALISIS DATA.....	16
3. PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 17	
4. TEMUAN	23
4.1 PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN.....	23
4.2 ISU DAN TANTANGAN DI SUMBA.....	24
4.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR	36
4.4 PRAKTIK TERBAIK LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR	43
4.5 PROFIL DAN ANALISIS SITUASI KELOMPOK KERJA GURU YANG DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH	43
4.6 PERENCANAAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN MELALUI MUSRENBANG DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA	45
4.7 KEMITRAAN.....	47
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	50
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1: Daftar peserta wawancara.....	15
Tabel 2. Daftar peserta FGD	16
Tabel 3: Indeks pembangunan manusia per kabupaten di Pulau Sumba Tahun 2016	17
Tabel 4: Angka partisipasi kasar dan murni tahun 2017	19
Tabel 5: Statistik pengulangan kelas dan tingkat pengulangan kelas berdasarkan kelas di sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur, 2017/2018.....	20
Tabel 6: Rasio siswa:guru dan kualifikasi guru	21
Tabel 7: Status akreditasi sekolah menurut kabupaten di Sumba, 2016	21
Tabel 8: Tiga intervensi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba.....	34
Tabel 9. Kebijakan dan program untuk meningkatkan distribusi, kualifikasi dan kompetensi guru	38
Tabel 10: Inisiatif lokal untuk meningkatkan literasi dan numerasi	39
Tabel 11: Harapan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dengan INOVASI.....	45
Tabel 12: Pemetaan pemangku kepentingan lokal	46
Tabel 13: Ringkasan temuan.....	47
Gambar 1: Angka partisipasi kasar di Prasekolah (PAUD) tahun 2016/2017	18
Gambar 2: Angka partisipasi sekolah berdasarkan gender di empat kabupaten di Sumba	19
Gambar 3: Pendanaan pendidikan dari APBD 2017 tidak termasuk transfer antardaerah	20
Gambar 4: Kualitas infrastruktur sekolah di Sumba, 2016	22

DAFTAR AKRONIM

3T	Terdepan, Terluar dan Tertinggal
ACDP	Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership)
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AUD	Dolar Australia
Bappeda	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BP3A	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPA	Badan Akreditasi Provinsi
BPMPD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
BPS	Badan Pusat Statistik
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
DD	Dana Desa
FGD	Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion)
FPPS	Forum Peduli Pendidikan Sumba
GGD	Guru Garis Depan
Guru BAIK	Program rintisan literasi dasar INOVASI
HDI	Indeks Pembangunan manusia (Human Development Index)
ICT	Informasi dan Teknologi Komunikasi (Information and Communication Technology)
IDR	Rupiah
IGI	Ikatan Guru Indonesia
INOVASI	Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia
K3S	Kelompok Kerja Kepala Sekolah
KKG	Kelompok Kerja Guru
LPMP	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran – tingkat sekolah menengah
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MKKS	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MoRA	Kementerian Agama
MoU	Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
musrenbang	Musyawarah Rencana Pembangunan
NGO	Lembawa Swadaya Masyarakat / LSM (Non-Governmental Organisation)
NSE	Standar Nasional Pendidikan / NSP (<i>national education standards</i>)
NTT	Nusa Tenggara Timur
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia

PKG	Pusat Kegiatan Gugus
PNS	Pegawai Negeri Sipil
SBM	Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management)
SLB	Sekolah Luar Biasa
SPG	Sekolah Pendidikan Guru
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
UKG	Uji Kompetensi Guru
UNDP	United Nations Development Program
WTA	William Toisuta Associates

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman pada bulan November 2017 untuk memulai implementasi proyek Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) di empat kabupaten di Sumba, yaitu: Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. INOVASI merupakan proyek kemitraan kolaboratif antara pemerintah Australia dan Indonesia di sektor pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di jenjang pendidikan dasar, terutama dalam hal literasi dan numerasi. Proyek ini fokus pada pengembangan, implementasi, dan uji coba berbagai solusi yang paling sesuai dengan konteks lokal yang berhasil meningkatkan hasil pembelajaran siswa melalui serangkaian program rintisan di empat kabupaten di Sumba.

Menindaklanjuti inisiasi proyek INOVASI, kami melakukan studi baseline ini untuk menyelidiki konteks sosial dan politik dari pendidikan dasar di Sumba. Studi ini berfokus pada tujuh tema investigasi: (a) persepsi pemangku kepentingan lokal terhadap kualitas pendidikan; (b) masalah dan tantangan pendidikan dasar; (c) program dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi tantangan; (d) praktik atau inovasi yang menjanjikan dalam pendidikan dasar; (e) pandangan pemangku kepentingan lokal tentang praktik Kelompok Kerja Guru (KKG) di setiap kabupaten; (f) kesempatan untuk menggunakan dana desa; dan (g) musrenbang untuk mendukung program peningkatan kualitas pendidikan dasar. Studi baseline ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membahas tujuan studi. Kami menggunakan wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD atau *Focus Group Discussion*) untuk mengumpulkan data tentang situasi pendidikan dasar, berdasarkan perspektif pemangku kepentingan lokal. Kami juga melakukan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi kebijakan dan program saat ini yang terkait dengan pendidikan di tingkat pusat dan lokal. Kebijakan dan dokumen hukum saat ini yang termasuk dalam tinjauan ini diidentifikasi selama wawancara dan dengan mencari saluran informasi elektronik dan non-elektronik.

Laporan baseline ini memberikan informasi tentang masalah dan tantangan pendidikan dasar di Sumba, serta menawarkan rekomendasi untuk intervensi proyek INOVASI.

Perspektif pemangku kepentingan lokal

Perspektif pemangku kepentingan lokal mengenai definisi dan indikator kualitas pendidikan cukup bervariasi, tergantung pada pengalaman mereka dalam sektor pendidikan dan peran lembaga mereka dalam sistem pendidikan. Sebagian besar praktisi pendidikan mendefinisikan kualitas pendidikan menurut delapan elemen yang dikutip dalam Standar Nasional Pendidikan. Sementara yang lainnya mendefinisikan kualitas pendidikan menggunakan istilah yang lebih umum seperti input, proses dan hasil pendidikan. Ini mencerminkan perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang standar kualitas pendidikan di Indonesia di antara para pemangku kepentingan. Namun, semua pemangku kepentingan menyadari pendidikan di Sumba berkualitas rendah dalam hal input, proses dan hasil. Tingkat kompetensi yang rendah dalam literasi dan numerasi di antara siswa sekolah dasar (SD) mulai kelas satu hingga kelas tiga membenarkan masalah kualitas pendidikan di Sumba. Ada konsensus di antara para pemangku kepentingan lokal bahwa meningkatkan kualitas guru adalah prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kecuali di Sumba Tengah di mana dukungan orang tua dianggap lebih penting.

Permasalahan kualitas pendidikan di Sumba

Studi ini mengidentifikasi beberapa kekurangan dalam kualitas pendidikan di empat kabupaten di Sumba. Masalah pertama berasal dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam sistem sekolah. Banyak guru di Sumba tidak memenuhi syarat sebagai guru dan kurang kompeten. Para pemangku kepentingan juga mengangkat masalah kekurangan jumlah guru tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan distribusi guru yang tidak merata yang berdampak buruk pada kualitas layanan pendidikan. Kurangnya kompetensi di antara kepala sekolah dalam hal kepemimpinan, manajemen dan pengawasan juga disebutkan. Masalah kompetensi kepala sekolah berkontribusi pada masalah ketidaksiplinan di antara siswa dan guru, serta kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, pengawas sekolah umumnya kurang memenuhi syarat dan tidak efektif

dalam monitoring kualitas pengajaran, pembelajaran dan manajemen sekolah. Lokasi sekolah yang terpencil dan topografi di daerah-daerah ini juga menantang bagi pengawas sekolah ketika melakukan kunjungan monitoring ke sekolah.

Masalah kedua adalah bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan proses pembelajaran di sekolah tidak efektif. Para pemangku kepentingan menyatakan bahwa sebagian besar guru tidak mempersiapkan pelajaran mereka secara teratur dengan cara menyusun dan mengikuti rincian rencana pembelajaran. Dengan demikian metode pengajaran mereka tidak kreatif atau menyenangkan dan mereka menggunakan praktik yang buruk untuk menilai dan memberikan umpan balik pada pembelajaran siswa.

Masalah ketiga di Sumba terkait dengan sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai. Kurangnya buku teks dan alat belajar juga disebutkan dalam studi ini. Perihal masalah literasi dan numerasi, sebagian besar sekolah di Sumba belum memiliki perpustakaan untuk mendukung budaya membaca. Beberapa sekolah memiliki perpustakaan tetapi tidak berfungsi dengan baik. Infrastruktur sekolah di empat kabupaten di Sumba digambarkan tidak memadai dan berkualitas buruk, dan masalah ini terus berlanjut karena keterbatasan dana.

Masalah keempat yang diangkat oleh para pemangku kepentingan dan memerlukan beberapa pertimbangan berkaitan dengan karakteristik peserta didik di Sumba, khususnya di kelas awal. Sebagian besar siswa kelas satu tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang angka dan alfabet ketika mereka mulai sekolah karena mereka tidak terdaftar dalam program pendidikan anak usia dini (PAUD). Siswa juga menghadapi hambatan bahasa di sekolah karena Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dan siswa terbiasa menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Praktik pekerja anak juga dapat memengaruhi kehadiran dan konsentrasi siswa di kelas. Informan kami juga menunjukkan bahwa kekurangan gizi dan pergi ke sekolah tanpa sarapan memiliki dampak negatif jangka panjang pada performa anak-anak di sekolah.

Anak-anak dengan karakteristik tertentu menghadapi kesenjangan dan diskriminasi dalam akses mereka ke pendidikan. Anak-anak difabel di Sumba Barat Daya tidak memiliki akses ke sekolah reguler atau sekolah yang dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus (Sekolah Luar Biasa atau SLB). Kondisi sosial Sumba berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Meskipun anak laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk pendidikan dasar, masih ada kesenjangan gender dalam akses ke pendidikan tinggi. Misalnya, anak laki-laki diistimewakan dalam pendaftaran pendidikan tinggi. Kasta sosial *maramba* (tuan) dan *ata* (hamba) yang ditemukan di Sumba Timur dan Tengah mengakibatkan anak-anak dari kasta *ata* tidak bersekolah. Anak-anak dari kepercayaan *Marapu* tidak memiliki akses ke pelajaran yang terkait dengan kepercayaan mereka selama kelas pelajaran agama. Lokasi terpencil beberapa sekolah sehubungan dengan rumah-rumah penduduk dan topografi berbukit dari beberapa daerah juga mempengaruhi akses anak-anak ke sekolah.

Kondisi sosial lain di Sumba diidentifikasi sebagai penghambat kualitas pendidikan. Responden memandang orangtua menyediakan dukungan yang terbatas untuk pendidikan anak-anak mereka. Mereka juga menyebutkan upacara adat yang mahal secara negatif mempengaruhi kualitas pendidikan di Sumba karena pengeluaran ini berdampak pada alokasi anggaran keluarga untuk pendidikan.

Kebijakan lokal dan perencanaan pemerintah dalam sektor pendidikan

Secara keseluruhan, kebijakan dan intervensi pemerintah daerah telah sesuai dengan masalah lokal terkait dengan pendidikan di Sumba dan pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Namun, perencanaan pemerintah dan belanja pendidikan hanya sedikit menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan. Dana pendidikan sebagian besar dihabiskan untuk gaji guru, fasilitas/sarana sekolah, dan infrastruktur/prasarana. Hanya sebagian kecil dari dana yang telah dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, dalam pertemuan perencanaan pembangunan, masyarakat dan bahkan praktisi pendidikan menunjukkan sedikit perhatian terhadap aspek kualitas pendidikan. Fokus utama perencanaan sektor pendidikan di desa adalah memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan.

Pemerintah daerah membentuk Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS) yang menunjukkan komitmen pemangku kepentingan lokal untuk menangani masalah pendidikan di Sumba. Forum ini memungkinkan pemerintah daerah di Sumba untuk mengadvokasi tingkat pusat mengenai masalah dan kebutuhan

pendidikan di Sumba. Forum ini juga secara bersamaan menciptakan sebuah gerakan untuk mengatasi masalah pendidikan di Sumba.

Studi ini juga menemukan beberapa kesamaan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru di empat kabupaten, yaitu dengan mengalokasikan dana dan melaksanakan program untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka. Secara khusus, pemerintah di Sumba Barat menyediakan beasiswa bagi siswa lokal untuk mengejar gelar pendidikan tinggi melalui program pendidikan dan pengajaran.

Kebijakan dan program umum untuk meningkatkan literasi dan numerasi ada di empat kabupaten. Ini berasal dari program nasional Departemen Pendidikan. Namun, ada beberapa perbedaan nyata dalam inisiatif pemerintah daerah. Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah fokus pada peningkatan kompetensi guru terkait literasi dan numerasi, bekerja sama dengan universitas dan lembaga lainnya. Pada saat yang sama, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah telah mengembangkan kurikulum untuk literasi dan numerasi untuk meningkatkan proses pembelajaran kelas satu hingga tiga. Sumba Barat, di sisi lain, berfokus pada peningkatan pengetahuan peserta didik sebelumnya melalui program PAUD.

Berkenaan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba, studi baseline ini mencatat beberapa keterbatasan dan tantangan dalam mengimplementasikan inisiatif atau kebijakan lokal. Rendahnya kualitas guru kontrak yang direkrut dan rendahnya kualifikasi kandidat lokal berkontribusi pada rendahnya kualitas guru di Sumba. Program pelatihan untuk guru tidak dianggap efektif dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan di Sumba. Studi ini juga menyoroti pembelajaran (*lesson learned*) dari tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum literasi dan numerasi di Sumba Tengah, yang timbul dari kurangnya dukungan kebijakan lokal.

Kelompok kerja guru

Analisis situasi dari KKG dalam studi ini menemukan bahwa banyak kelompok kerja guru yang melakukan kegiatan rutin, khususnya di tingkat gugus. Kelompok-kelompok ini lebih aktif dibandingkan dengan temuan dari studi sebelumnya (ACDP 2016). Namun, kegiatan kelompok kerja guru ini tidak optimal dalam meningkatkan kualitas guru.

Praktik terbaik lokal

Para pemangku kepentingan menyebutkan beberapa inisiatif lokal yang dapat dianggap sebagai praktik baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba, termasuk manajemen berbasis sekolah dan menyediakan perpustakaan di masyarakat untuk mempromosikan budaya membaca. Di Sumba Tengah, satu guru telah menggunakan pertemuan sekolah untuk mempromosikan pendidikan tinggi di antara anak-anak dan keluarga dari kasta hamba (*ata*).

Kemitraan

Pemerintah daerah merespons secara positif proyek INOVASI di Sumba dan telah menunjukkan komitmen mereka dengan mengalokasikan anggaran untuk bekerja sama dengan INOVASI sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Studi ini juga mengidentifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya di Sumba sebagai mitra potensial bagi INOVASI untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Sumba dan terutama dalam hasil literasi dan numerasi untuk anak-anak kelas satu hingga tiga.

Rekomendasi yang Diajukan

Temuan studi ini menunjukkan bahwa empat proyek program rintisan yang telah diprakarsai INOVASI di empat kabupaten di Sumba sesuai dengan fokus pemerintah daerah tentang peningkatan kualitas guru dengan memperkuat KKG dan meningkatkan literasi dan numerasi dasar di kalangan siswa kelas satu hingga tiga. Laporan ini membuat beberapa rekomendasi untuk INOVASI serta para pemangku kepentingan lokal untuk membantu lebih meningkatkan sistem pendidikan di Sumba.

Implikasi untuk program INOVASI

Pertama, INOVASI dapat berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas praktisi pendidikan lokal. Mempertimbangkan keterbatasan program pelatihan guru di daerah tersebut saat ini, INOVASI berkesempatan untuk memulai program percontohan untuk meningkatkan kompetensi guru, misalnya dengan membantu mengembangkan kurikulum untuk pelatihan guru di Sumba. Program-program semacam itu perlu didasarkan pada kebutuhan guru dan harus menekankan kompetensi guru kelas awal dalam mendorong kemampuan literasi dan numerasi siswa. Pelatihan untuk guru kelas awal dapat mencakup penerapan metode pengajaran multibahasa yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar kedua untuk membantu siswa mengatasi hambatan bahasa. Dengan menggunakan pendekatan eksperimental, program ini dapat menghasilkan bukti tentang efektivitas kurikulum dalam meningkatkan kompetensi guru. INOVASI perlu melakukan asesmen pada guru yang ditargetkan untuk berpartisipasi dalam percobaan ini untuk mengetahui tingkat kompetensi mereka saat ini. Pengembangan program untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pengawas adalah intervensi lain yang dapat dipertimbangkan INOVASI untuk meningkatkan tata kelola sekolah.

Kedua, INOVASI dapat berkontribusi untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan literasi dasar dan numerasi dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar kedua untuk mengatasi hambatan bahasa dalam pembelajaran. Dalam kasus Sumba Tengah, yang sudah memiliki kurikulum literasi, INOVASI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menguji dan meningkatkan kurikulum dan membantu mengembangkan penerapannya di sekolah.

Ketiga, INOVASI dapat meningkatkan efektivitas forum KKG dalam meningkatkan kualitas guru. Meningkatkan kapasitas komite KKG untuk mengelola dan mengembangkan program kelompok tersebut sangat penting supaya KKG semakin efektif. Kegiatan program rintisan INOVASI yang ditujukan pada peningkatan kualitas guru dapat diimplementasikan melalui kelompok-kerja guru ini. INOVASI juga dapat mengembangkan dan mempromosikan model diskusi untuk pertemuan KKG, dengan fokus pada kegiatan penyelesaian masalah untuk menemukan solusi untuk masalah pendidikan yang diangkat melalui forum ini.

Kontribusi keempat yang INOVASI dapat lakukan adalah memfasilitasi proses berbagi dan belajar di seluruh kabupaten untuk semua inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diterapkan di setiap kabupaten. Proses pembelajaran dapat dilakukan melalui FPPS dan akan memastikan gerakan yang berkelanjutan, mendorong inovasi lokal dalam pendidikan dan menciptakan lingkungan yang kompetitif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba. Memperkuat forum sebagai konsorsium untuk pemerintah daerah dan LSM untuk berfokus pada peningkatan kompetensi guru dan menangani masalah literasi dan numerasi di setiap kabupaten. Sebuah konsorsium dapat dibentuk di setiap kabupaten untuk mengembangkan kurikulum untuk guru dan kurikulum tentang literasi dan numerasi menggunakan metode penelitian tindakan secara kolaboratif. Konsorsium adalah kesempatan untuk menggabungkan semua sumber daya lokal untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama, memperluas cakupan dan membuat program berkelanjutan.

Akhirnya, praktisi pendidikan dan masyarakat desa perlu diberdayakan untuk mengubah pola pikir lokal dari fokus pada infrastruktur menjadi fokus pada aspek kualitas pendidikan dalam usulan pertemuan perencanaan pembangunan mendatang.

Implikasi kebijakan

Kurangnya dukungan kebijakan lokal, seperti peraturan daerah atau kabupaten, dapat menciptakan hambatan ketika pemerintah ingin mengadopsi atau mengalokasikan anggaran untuk menerapkan inisiatif baru. Oleh karena itu, pada saat yang bersamaan dengan kegiatan INOVASI lainnya, INOVASI perlu mengembangkan proyek program rintisan dan advokasi yang akan menghasilkan kebijakan lokal dan kerangka hukum untuk mendukung inisiatif lokal dalam meningkatkan literasi dan numerasi.

Advokasi dapat mendorong pemangku kepentingan lokal untuk fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung dan memperluas program yang dikembangkan oleh mitra lokal untuk meningkatkan kualitas guru dan hasil literasi dan numerasi. Misalnya, pemerintah daerah

dapat mengalokasikan anggaran untuk berkolaborasi dengan INOVASI dan mereplikasi model proyek INOVASI di sekolah lain.

Analisa efektivitas biaya kebijakan pendidikan di empat kabupaten di Sumba akan membantu mengidentifikasi sumber potensial tambahan pendanaan (atau realokasi anggaran yang ada) untuk aspek-aspek kualitas pendidikan. Advokasi agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka khusus untuk aspek kualitas dapat didasarkan pada analisis tersebut. INOVASI terus mengadvokasi agar semua pemerintah daerah mengalokasikan dukungan anggaran untuk KKG dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) sebagai forum penting untuk pembelajaran. Inisiatif Sumba Timur untuk mengalokasikan BOSDA adalah praktik lain yang dapat dipromosikan di kabupaten lainnya.

INOVASI juga dapat membantu memperkuat peran Dinas Pendidikan Kabupaten dalam: (1) menerapkan pemeriksaan jaminan mutu pendidikan eksternal dan internal untuk mengamati kualitas pendidikan terhadap Standar Nasional Pendidikan, termasuk memperkuat sistem monitoring untuk proses pendidikan di sekolah seperti yang dilakukan oleh staf pendidikan dan pengawas sekolah; (2) mengembangkan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) memperkuat proses monitoring untuk merekrut guru kontrak lokal dengan menetapkan persyaratan minimum untuk mematuhi UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Memprakarsai hukum adat untuk mengurangi dampak upacara adat yang mahal dan praktik pekerja anak terhadap kualitas pendidikan, serta untuk meningkatkan dukungan orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan anak-anak, akan mengatasi beberapa masalah lokal yang diangkat dalam studi ini.

1. PENGANTAR

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan dari program INOVASI adalah untuk mempercepat kemajuan menuju peningkatan hasil pembelajaran untuk siswa Indonesia. Di tingkat sub-nasional, INOVASI bekerja dengan sejumlah mitra kabupaten, termasuk empat kabupaten sasaran di Sumba, Nusa Tenggara Timur, untuk mengidentifikasi dan menguji praktik belajar mengajar yang secara efektif meningkatkan hasil pembelajaran dalam konteks tertentu. Selain mempertimbangkan jumlah populasi, kemampuan dan sumber daya finansial pemerintah daerah dan kebutuhan provinsi untuk pembangunan, Sumba dipilih setelah analisis situasi yang komprehensif tentang kondisi belajar-mengajar, dan bukti praktik tata kelola kabupaten yang inovatif di seluruh pulau.

Menurut data statistik yang relevan di tingkat provinsi, pendidikan dasar di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal aksesibilitas dan peningkatan kualitas belajar-mengajar. Data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2016 menunjukkan bahwa hanya tiga dari empat anak usia sekolah yang bersekolah. Ini artinya bahwa 25 persen anak-anak di provinsi tersebut tidak pernah bersekolah atau putus sekolah. Sementara itu, *Save the Children*, melalui laporan mereka (Penilaian Literasi), menyampaikan bahwa 28,76 persen guru tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam mengajar. Berhubungan dengan tingkat literasi, data Susenas 2016 menunjukkan bahwa tingkat literasi 15 tahun ke atas di Nusa Tenggara Timur adalah 91,52 persen. Ini berarti bahwa 8,48 persen dari kelompok umur ini masih buta huruf.

Di tingkat kabupaten, data yang diambil dari neraca pendidikan daerah 2017 tentang kualitas guru dan APBD untuk sektor pendidikan berpotensi memengaruhi hasil belajar siswa di Sumba. Tentang kualitas guru, data menunjukkan bahwa guru di sebagian besar kabupaten Sumba memiliki skor yang lebih rendah dalam uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2017 daripada skor rata-rata untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (48,68) dan skor yang jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional (54,33). Selain itu, dari 7.767 guru di Sumba, 60 persen tidak memiliki gelar sarjana. Dalam hal alokasi anggaran daerah untuk pendidikan, semua kabupaten di Sumba telah memenuhi UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menetapkan alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan. Sebagian besar dana pendidikan berasal dari transfer ke daerah dan anggaran setempat hanya menyumbang sekitar 8-13 persen (tidak termasuk transfer daerah). Faktor-faktor ini mengakibatkan hasil belajar siswa yang buruk, seperti ditunjukkan oleh tingginya tingkat tidak naik kelas dan putus sekolah di kabupaten-kabupaten di Sumba.

Tantangan yang disebutkan di Sumba dikuatkan oleh hasil studi Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan tentang strategi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dasar di SD umum dan agama di Sumba, Nusa Tenggara Timur (ACDP 2016). Studi ini mengidentifikasi beberapa masalah prioritas yang perlu ditangani: (1) kualifikasi guru; (2) ketersediaan dan distribusi guru; (3) alokasi sumber daya berkelanjutan; (4) kualitas pengajaran; dan (5) kesiapan untuk belajar. Selain itu, studi ini menemukan bahwa proporsi siswa kelas dua yang tidak dapat membaca masih tinggi, sekitar 30 persen.

Laporan baseline Sumba ini sejalan dengan teori perubahan INOVASI dan akan mendukung program rintisan di Sumba, karena berfokus pada persepsi pemangku kepentingan terkait masalah pendidikan dasar di Sumba. Masalah tersebut meliputi: (1) kualitas pendidikan; (2) tantangan (kurang kompeten dalam literasi dan numerasi; kualifikasi, kompetensi dan distribusi guru; proses pembelajaran yang tidak efektif; sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai); (3) kebijakan dan program pemerintah daerah untuk kualitas pendidikan dasar; (4) praktik baik setempat untuk kualitas pendidikan dasar; (5) analisis profil dan situasi KKG; (6) perencanaan pembangunan pemerintah dan alokasi dana desa; dan (7) kemitraan. Selain itu, studi baseline ini bertujuan untuk mendukung perencanaan dan penerapan proyek program rintisan dan untuk menampung masalah-masalah yang relevan untuk mendukung kegiatan program rintisan. Dengan mengacu pada teori perubahan dan kerangka hasil INOVASI, serta hasil perencanaan kabupaten di Sumba, INOVASI akan menggunakan hasil baseline ini untuk meningkatkan, menyesuaikan, dan mengevaluasi penerapan program rintisan. Program rintisan INOVASI di Sumba mencakup:

- Kepemimpinan berbasis pembelajaran: bertujuan untuk menghasilkan perubahan praktik dan kebijakan di bidang manajemen sekolah, dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi;
- Penggunaan berbagai bahasa untuk mendukung literasi: bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru untuk melakukan pengajaran dalam multibahasa, mendorong penggunaan bahasa daerah dan Bahasa Indonesia untuk mendukung pembelajaran literasi di Sumba Timur;
- Guru BAIK: bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di Sumba Barat Daya dengan mengatasi kesulitan belajar dalam kompetensi dasar;
- Meningkatkan kualitas pengajaran literasi dasar: bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa kelas awal di 17 sekolah (15 sekolah negeri dan dua sekolah swasta) di tiga kecamatan di Sumba Tengah

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan keseluruhan dari studi baseline ini adalah untuk menangkap dan menyediakan basis informasi tentang penyediaan layanan pendidikan dasar di Sumba, serta kebijakan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program rintisan INOVASI. Melalui studi ini, arah, strategi dan kegiatan program rintisan di Sumba dapat ditinjau, disesuaikan dan diperbaiki untuk meningkatkan dan mendukung efektivitas setiap program rintisan. Berdasarkan data baseline ini, perubahan yang dihasilkan dari program rintisan dapat diukur secara teratur dan sistematis.

Di tingkat program rintisan, sebagaimana dijelaskan dalam teori perubahan INOVASI, laporan baseline ini akan membantu

- mencatat dan mengidentifikasi masalah kebijakan nasional dan lokal;
- mendiagnosa dan memahami tantangan, kebijakan, dan solusi lokal;
- mendukung perencanaan program rintisan yang relevan dengan konteks (hasil):
- menerapkan program rintisan yang relevan dengan konteks; dan
- mengidentifikasi dampak perubahan praktik pada pemangku kepentingan dan hasil pembelajaran siswa.

Di tingkat program, INOVASI dapat menggunakan laporan baseline ini untuk merencanakan potensi perubahan terkait scale-out dan program rintisan berbasis sistem dan perubahan kebijakan (terkait peraturan, anggaran dan perencanaan) yang secara langsung dan tidak langsung meningkatkan hasil pembelajaran.

Studi ini dirancang oleh divisi monitoring, evaluasi dan pembelajaran nasional program INOVASI di Jakarta.

2. METODOLOGI

Tujuan dari studi baseline ini adalah untuk mengembangkan potret status pendidikan dasar saat ini di Sumba sebelum INOVASI memulai intervensi apa pun. Studi ini bertujuan untuk memahami persepsi pemangku kepentingan lokal tentang kualitas pendidikan dan tantangan terhadap program pendidikan dasar di daerah tersebut, serta untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakan, inisiatif, atau solusi apa pun yang telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data dan dengan demikian memberikan informasi mendalam dan analisis situasi terkait dengan pendidikan di Sumba yang tidak mungkin diperoleh dari studi kuantitatif murni.

2.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Studi ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama: wawancara semi-terstruktur dan FGD. Wawancara dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten, sedangkan FGD hanya dilakukan di tingkat kabupaten. Tinjauan dokumen terkait juga ditambahkan untuk mendukung proses analisis data. Tinjauan pustaka juga mengidentifikasi kebijakan dan program yang relevan saat ini terkait dengan pendidikan di tingkat pusat dan lokal. Kebijakan dan dokumen hukum yang dikutip dalam studi ini diidentifikasi selama wawancara atau diskusi, atau melalui pencarian saluran informasi elektronik dan non-elektronik.

Pertanyaan-pertanyaan utama yang diajukan selama wawancara dan FGD ialah: (a) pandangan tentang kualitas pendidikan menurut pemangku kepentingan lokal; (b) masalah dan tantangan pendidikan dasar; (c) program dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi tantangan; dan (d) praktik menjanjikan atau inovasi lainnya dalam pendidikan dasar. Selain masalah-masalah ini, kami juga berusaha memahami pandangan peserta FGD tentang: praktik KKG di setiap kabupaten; Dana Desa; musrenbang dan potensinya untuk mendukung program peningkatan kualitas pendidikan dasar. Wawancara dan FGD berlangsung dari 15 hingga 90 menit dan semua direkam menggunakan perekam suara digital.

Data dikumpulkan oleh staf INOVASI yang bekerja di Sumba dan wilayah lain. Baseline melibatkan staf monitoring dan evaluasi INOVASI di Sumba, serta fasilitator daerah. Secara keseluruhan, lima peneliti mengumpulkan data melalui FGD dan wawancara.

2.2 PENGATURAN DAN PESERTA

Studi ini berfokus pada kondisi pendidikan dasar terkini di Pulau Sumba yang meliputi empat kabupaten: Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Kami juga melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan lokal di tingkat provinsi di Kupang dalam kegiatan pengumpulan data untuk memperoleh gambaran umum tentang pendidikan dasar di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peserta dalam studi ini mencakup berbagai pemangku kepentingan lokal, dari tingkat kabupaten hingga provinsi (lihat Tabel).

Tabel 1: Daftar peserta wawancara

Provinsi	Kabupaten
1. Sekretaris daerah / asisten ketiga dari gubernur yang mengawasi sektor pendidikan.	1. Bupati / sekretaris daerah / asisten ketiga dari bupati yang mengawasi sektor pendidikan
2. Ketua / anggota komisi yang mengelola sektor pendidikan di DPRD	2. Ketua / anggota komisi yang mengelola sektor pendidikan di DPRD
3. Kepala atau sekretaris Dinas Kemendikbud	3. Kepala / sekretaris Dinas Kemendikbud
4. Divisi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Kemendikbud	4. Divisi pendidikan dasar, Kemendikbud
	5. Divisi sosial dan budaya di Bappeda
	6. Kepala dewan pendidikan

5. Divisi sosial dan budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	7. Ketua PGRI / IGI
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	
7. Kepala dewan pendidikan	
8. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) / Ikatan Guru Indonesia (IGI)	

Untuk FGD, peserta di setiap kabupaten dibagi menjadi dua kelompok: kelompok A, yang terdiri dari pemangku kepentingan lokal dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kementerian Agama (Kemenag); dan kelompok B yang terdiri dari unsur-unsur yang sedikit lebih beragam (Tabel 2).

Tabel 2: Daftar peserta FGD

No	Kelompok A	Kelompok B
1	Perwakilan dari KKG	Perwakilan dari divisi pendidikan dasar, Kemendikbud
2	Kepala gugus SD (kepala sekolah)	Perwakilan Bappeda di tingkat kabupaten
3	Pengawas SD	Perwakilan dari Kementerian Layanan Sosial
4	Kepala bagian kurikulum dan penilaian, Kemendikbud	Perwakilan dewan pendidikan
5	Divisi guru dan tenaga kependidikan, Kemendikbud	Perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A atau BP3AKB)
6	Sub-bagian program / perencanaan, Kemendikbud	Kepala desa atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).
7	Bagian pendidikan Madrasah di Kemenag	Perwakilan dari LSM

2.3 ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan dalam studi ini sebagian besar kualitatif, melibatkan proses induktif dan berkelanjutan yang dimulai dari tahap pengumpulan data dan berlanjut hingga saat penulisan laporan ini. Setelah pengumpulan data selesai, semua data mentah dikelola dan disiapkan untuk analisis lebih lanjut. Rekaman wawancara dan FGD ditranskripsi untuk memfasilitasi proses analisis data kualitatif. Untuk data wawancara dan diskusi, analisis tematik dilakukan menggunakan transkrip beranotasi. Kami mengembangkan pengkodean dan kategori menggunakan logika deduktif (berdasarkan daftar pertanyaan) dan logika induktif (berdasarkan kode baru yang muncul dari diskusi dan wawancara). Pengkodean kemudian dilakukan selama fase kedua dan terdiri dari dua proses: (1) menghasilkan kode awal untuk mengidentifikasi pola sementara dalam data; dan (2) meninjau pengkodean untuk memastikan pengkodean tersebut terkait dengan pertanyaan penelitian dan bahwa setiap kode mencerminkan ide yang berbeda. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi tema-tema awal dari pengkodean, mengulasnya dan kemudian menentukan tema akhirnya. Pada akhirnya, kami menggunakan analisis integrasi untuk melakukan triangulasi temuan dari tinjauan pustaka dan studi kualitatif.

3. PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari enam pulau utama. Provinsi ini dibagi menjadi 21 kabupaten dan satu kotamadya, dengan perkiraan populasi 5.203.514 pada 2016. Provinsi ini memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah dan berada di peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia pada 2016. Tabel 3 menunjukkan variasi dalam Tingkat IPM lintas kabupaten di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumba. Variasi tersebut mencerminkan kesenjangan dalam mencapai dimensi utama pembangunan manusia, termasuk: kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Sumba Timur memiliki tingkat IPM tertinggi di kabupaten di Sumba sedangkan Sumba Tengah memiliki tingkat terendah. Rendahnya prestasi dalam dimensi pendidikan dan pendapatan per kapita berkontribusi pada rendahnya tingkat IPM di Sumba Tengah dalam periode tersebut.

Dalam dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa akses ke pendidikan tinggi untuk penduduk di Nusa Tenggara Timur, terutama di empat kabupaten di Sumba, umumnya rendah. Rata-rata, orang berusia 25 tahun ke atas di daerah itu hanya memperoleh pendidikan SD. Harapan lama sekolah pada tahun 2016 menunjukkan bahwa populasi usia 7 tahun diperkirakan akan tetap bersekolah hingga sekolah menengah atau hingga tingkat diploma satu (D-1).

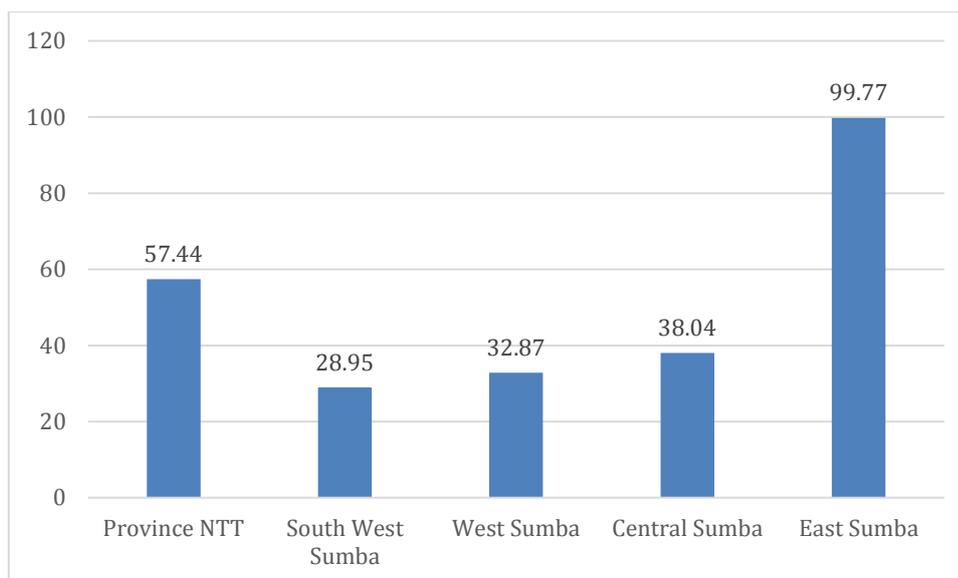
Tabel 3: Indeks pembangunan manusia per kabupaten di Pulau Sumba tahun 2016

Kabupaten	Harapan hidup saat lahir	Harapan lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	Pendapatan per kapita	IPM
Sumba Barat Daya	67,71	13,02	6,29	6,079	61,31
Sumba Barat	66,15	12,64	6,45	6,914	61,85
Sumba Tengah	67,73	11,93	5,12	5,907	58,52
Sumba Timur	64,00	12,30	6,48	9,004	63,22
NTT	66,04	12,97	7,02	7,122	63,13

Sumber: IPM, Nusa Tenggara Timur, 2016

Sebagian besar anak di bawah usia enam tahun di Nusa Tenggara Timur memiliki akses terbatas ke PAUD. Angka partisipasi kasar PAUD untuk 2016/2017 di provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 57,44, lebih rendah dari angka nasional 72,35. Di tingkat kabupaten di Pulau Sumba, tingkat pendaftaran jauh lebih rendah di tiga kabupaten, kecuali Sumba Timur. Kurangnya guru, sarana dan prasarana untuk prasekolah, serta kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya PAUD telah mempengaruhi rendahnya akses prasekolah di Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1: Angka partisipasi kasar di PAUD tahun 2016/2017



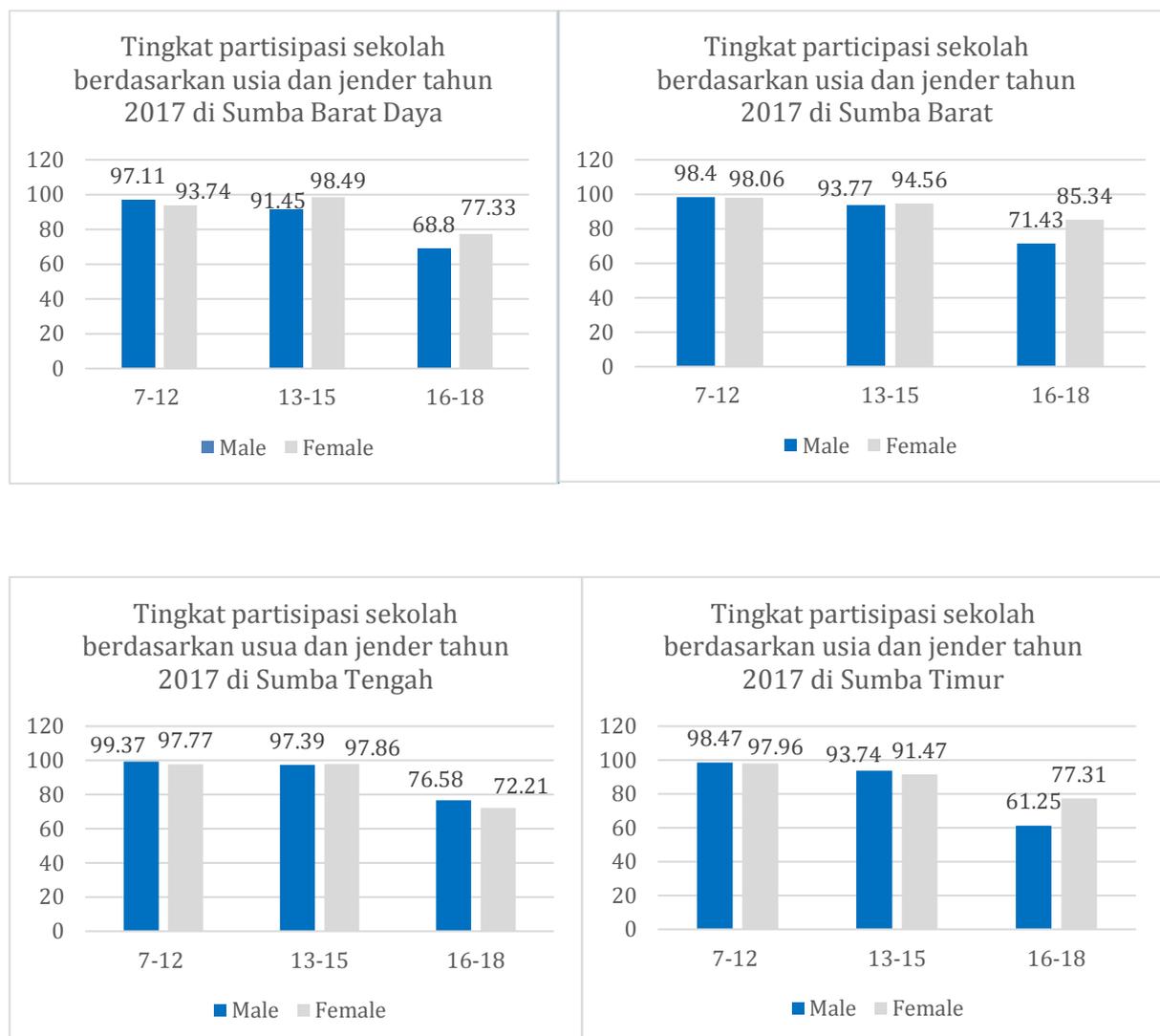
Sumber: Kemendikbud 2017

Sebagian besar anak berusia 7-15 tahun di Sumba memiliki akses pada pendidikan dasar 12 tahun. Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi sekolah untuk anak-anak berusia 7-15 di empat kabupaten lebih dari 96 persen pada tahun 2017. Namun, angka tersebut juga menunjukkan bahwa sejumlah anak di Sumba tidak dapat mengakses pendidikan dasar. Bahkan tampaknya ada kecenderungan penurunan dalam partisipasi sekolah untuk anak-anak yang lebih tua, terutama dalam kisaran usia 16-18. Angka partisipasi kasar dan murni pada tahun 2017 (Tabel) menunjukkan penurunan yang sama dalam partisipasi sekolah. Statistik pendidikan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2017 menunjukkan bahwa satu dari empat anak dalam kelompok usia 16-18 tahun putus sekolah. Angka putus sekolah tiga kali lebih tinggi di antara anak-anak di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan.

Dalam hal gender, data menunjukkan akses yang setara ke pendidikan dasar untuk anak laki-laki dan perempuan. Namun, kesenjangan dalam akses pendidikan muncul untuk kelompok usia 16-18 tahun di mana tingkat partisipasi lebih tinggi untuk anak perempuan daripada anak laki-laki di tiga kabupaten kecuali Sumba Tengah. Ini mencerminkan tingkat putus sekolah yang lebih tinggi di antara anak laki-laki dalam kelompok usia 16-18 tahun di Sumba.

Menurut statistik pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017, anak-anak di daerah perkotaan dan pedesaan memiliki akses yang sama ke pendidikan dasar, masing-masing 98,31 persen dan 98,26 persen. Namun, kesenjangan akses muncul pada tahap pendidikan tinggi. Jarak ke sekolah dan fasilitas transportasi lokal yang terbatas mempengaruhi tingkat pendidikan yang lebih tinggi di daerah pedesaan.

Gambar 2: Angka partisipasi sekolah berdasarkan gender di empat kabupaten di Sumba



Sumber: BPS 2017

Tabel 4: Angka partisipasi kasar dan murni tahun 2017

	Angka partisipasi kasar				Angka partisipasi murni			
	SD	SMP	SMA	Pendidikan Tinggi	SD	SMP	SMA	Pendidikan Tinggi
Provinsi	114,05	91,35	78,83	24,35	95,4	67,16	53,32	16,55
Sumba Barat Daya	124,02	89,75	57,99	18,50	94,68	61,29	41,44	14,81
Sumba Barat	114,94	98,12	80,32	13,79	96,78	67,66	56,54	12,68
Sumba Tengah	114,74	98,89	63,47	25,85	96,36	70,54	43,62	14,20
Sumba Timur	116,25	90,95	75,92	22,96	94,40	68,72	54,92	15,69

Sumber: Kemendikbud 2017

Selain akses pendidikan, kualitas hasil pendidikan di Nusa Tenggara Timur juga rendah (lihat Tabel). Tingkat mengulang kelas di antara siswa SD pada 2017/2018 di Nusa Tenggara Timur secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional (4,01 dibandingkan dengan 1,44). Tabel 3.3 juga menunjukkan bahwa tingkat mengulang secara konsisten lebih tinggi di antara anak laki-laki daripada perempuan di seluruh kelas. Angka mengulang yang tinggi ini terlihat jelas di antara anak-anak di kelas satu hingga tiga, yang menunjukkan perlunya meningkatkan kualitas pendidikan di kelas-kelas awal.

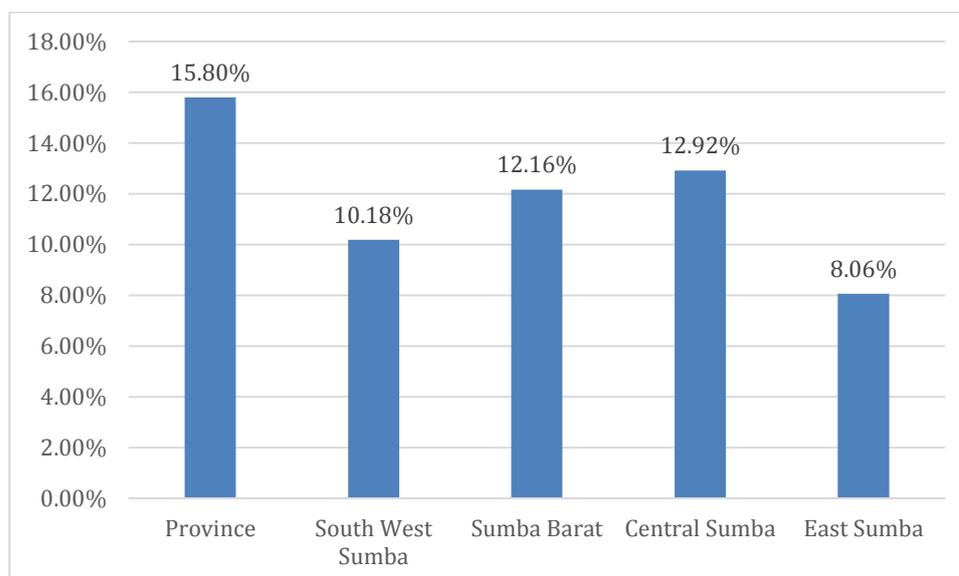
Tabel 5: Statistik mengulang kelas dan tingkat mengulang berdasarkan kelas di SD di Nusa Tenggara Timur, 2017/2018

Kelas	Jumlah pengulang		Total jumlah pengulang	Tingkat pengulangan	
	Laki-laki	Perempuan		Provinsi	Laki-laki
I	8.768	5.242	14.010	10,35	3,73
II	4.145	2.038	6.183	4,37	1,76
III	3.596	1.607	5.203	3,82	1,43
IV	2.650	1.221	3.871	2,78	0,94
V	1.874	896	2.770	2,07	0,71
VI	30	20	50	0,04	0,04

Sumber: Kemendikbud 2018

Dalam hal anggaran pendidikan, UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Amandemen Undang-undang Ketiga tahun 2001 mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20 persen dari pembelanjaan mereka untuk pendidikan. Secara keseluruhan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah daerah di empat kabupaten di Sumba telah mematuhi peraturan ini. Namun, dana pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten sebagian besar bergantung pada transfer ke daerah (dari APBN). Gambar 3 menunjukkan proporsi anggaran pendidikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan oleh provinsi dan empat kabupaten pada tahun 2017. Dana pendidikan sebagian besar dihabiskan untuk gaji guru, sarana dan prasarana sekolah.

Gambar 3: Pendanaan pendidikan dari APBD 2017 tidak termasuk transfer antardaerah



Sumber: Kemendikbud 2017

Kualitas guru yang rendah menjadi ciri pendidikan di Sumba. Tabel di bawah ini menunjukkan tingginya persentase guru di Sumba yang tidak memiliki kualifikasi minimum guru sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang Guru (No. 14 tahun 2005) berupa gelar sarjana atau diploma empat tahun. Selanjutnya, hasil UKG untuk guru SD di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 adalah 48,68 - lebih rendah dari rata-rata nasional 56,69. Demikian juga, hasil UKG untuk guru SD di Sumba berada di bawah rata-rata provinsi, kecuali di Sumba Timur. Terlepas dari status pekerjaan guru, rasio antara siswadan guru di Sumba memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Tabel 6: Rasio siswa:guru dan kualifikasi guru

	Rasio siswa-guru	Kualifikasi guru		Tes kompetensi guru SD
		Diploma di bawah 4 tahun	Diploma minimal 4 tahun	
Provinsi	17	36,98%	63,02%	48,68
Sumba Barat Daya	30	55,50%	44,50%	43,42
Sumba Barat	21	42,80%	57,20%	44,78
Sumba Tengah	26	56,50%	43,50%	46,42
Sumba Timur	16	39,70%	60,30%	54,33

Sumber: Kemendikbud 2016

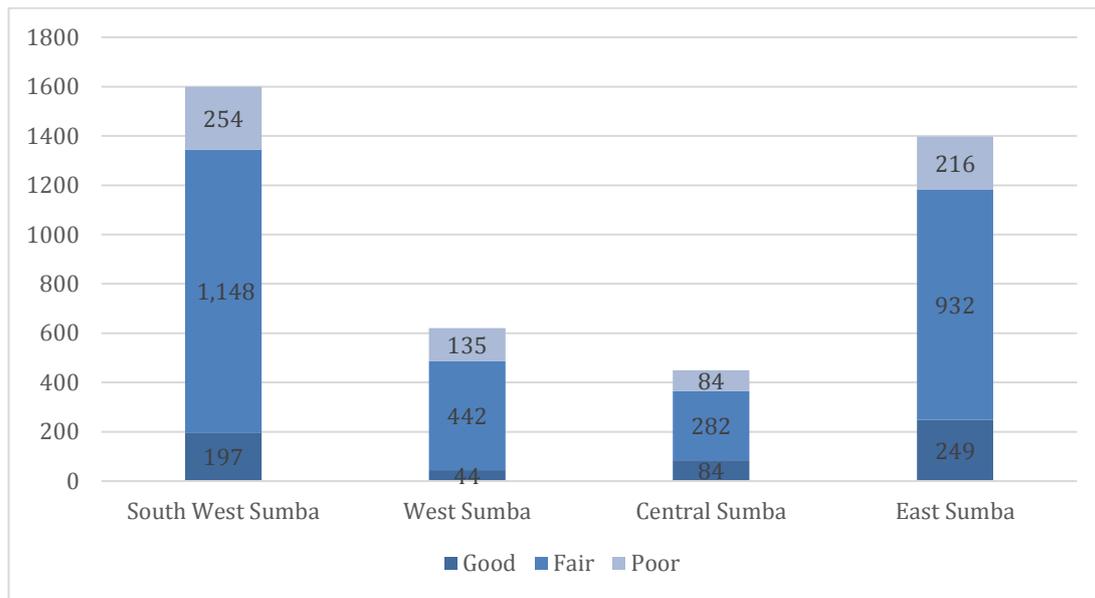
Tabel berikut ini menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen SD di Sumba belum menerima status akreditasi. Penting untuk dicatat bahwa informasi dalam tabel ini tidak mencerminkan kualitas sekolah di Sumba karena akreditasi sekolah dilakukan setiap empat tahun. Selanjutnya jumlah sekolah yang dievaluasi untuk akreditasi tergantung pada anggaran Kementerian Pendidikan dan dewan akreditasi provinsi (BPA). Meskipun sebuah sekolah siap untuk proses akreditasi, sekolah itu mungkin berada dalam daftar tunggu selama beberapa waktu. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas sekolah masih menjadi masalah di Sumba meskipun sebagian besar sekolah memiliki peringkat kualitas yang 'cukup' dalam infrastruktur sekolah untuk mendukung proses pendidikan (lihat Gambar 3).

Tabel 7: Status akreditasi sekolah menurut kabupaten di Sumba, 2016

	Status akreditasi sekolah pada tahun 2016			
	A	B	C	Tidak terakreditasi
Provinsi	0,90%	12,50%	11,50%	75,00%
Sumba Barat Daya		3,90%	11,40%	84,60%
Sumba Barat	1,10%	11,20%	7,90%	79,80%
Sumba Tengah		11,10%	25,90%	63,00%
Sumba Timur	5,10%	14,50%	7,10%	73,30%

Sumber: Kemendikbud 2016

Gambar 3: Kualitas infrastruktur sekolah di Sumba, 2016



Sumber: Kemendikbud 2016

4. TEMUAN

Bab ini menyajikan perspektif pemangku kepentingan lokal tentang kualitas pendidikan, masalah dan tantangan dalam pendidikan dasar yang memengaruhi hasil belajar siswa SD di empat kabupaten di Sumba. Kami juga menjelaskan prioritas utama intervensi untuk mengatasi masalah ini berdasarkan perspektif pemangku kepentingan lokal. Kami menguraikan tindakan strategis yang saat ini diambil oleh pemangku kepentingan lokal untuk mengatasi masalah pendidikan dasar dan bagaimana tindakan tersebut diterapkan, diikuti oleh arahan untuk meningkatkan hasil belajar di Sumba sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan ke depan. Bab ini juga menyajikan situasi terkini mengenai KKG dan proses rencana pembangunan.

4.1 PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN

Bagian ini menyajikan persepsi pemangku kepentingan lokal tentang kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur dan di empat kabupaten di Pulau Sumba. Temuan dari wawancara dan FGD mengungkapkan berbagai perspektif tentang kualitas pendidikan. Alih-alih mendefinisikan kualitas pendidikan, semua peserta menggunakan beberapa indikator terkait dengan pendidikan untuk menggambarkan kualitas. Beberapa orang yang diwawancarai menyebutkan bahwa pendidikan berkualitas akan dicapai dengan memenuhi delapan komponen dalam Standar Nasional Pendidikan. Namun perspektif ini cenderung berasal dari peserta dengan pengalaman panjang sebagai praktisi pendidikan (sebagai kepala sekolah, perwakilan asosiasi guru dan di dewan pendidikan) atau peserta yang telah bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Provinsi atau di LPMP. Kami juga mengumpulkan perspektif staf LSM yang fokus pada masalah pendidikan di Pulau Sumba. Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 memberikan dasar dan kriteria untuk sistem pendidikan nasional di Indonesia. Delapan gugus standar meliputi: a) isi pendidikan; (b) proses pendidikan; (c) kompetensi lulusan; (d) kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; (e) sarana dan pra sarana; (f) pengelolaan pendidikan; (g) pembiayaan pendidikan; dan (h) penilaian pendidikan.

Namun, sebagian besar yang diwawancarai menggambarkan kualitas pendidikan menggunakan indikator yang mengacu pada komponen sistem pendidikan, termasuk: input, proses dan hasil. Pemahaman narasumber yang diwawancarai tentang kualitas pendidikan berpusat pada input seperti: kualifikasi dan kompetensi guru, rasio antara guru dan siswa, kurikulum, infrastruktur dan fasilitas. Narasumber yang diwawancarai berasumsi bahwa kualitas komponen-komponen tersebut menentukan kualitas hasil pendidikan.

Semua pemangku kepentingan menyoroti guru sebagai input paling penting yang menentukan kualitas pendidikan dalam sistem pendidikan. Guru juga diakui sebagai aktor utama dalam proses pendidikan. Jika guru memiliki gelar sarjana, kompeten dan menerima kompensasi yang memadai, maka kualitas pendidikan akan meningkat. Seperti yang dinyatakan salah satu peserta:

'Menurut pendapat saya, sekolah dengan pendidikan berkualitas dapat dilihat pertama kali dari para guru ... menurut standar pendidikan Indonesia, guru SD harus memiliki kualifikasi gelar sarjana ... Jika para guru berkualifikasi dan memiliki pengalaman yang baik, tentunya kualitas pendidikan layanan akan jauh lebih baik' (peserta FGD kelompok B, Sumba Barat Daya).

Perspektif pemangku kepentingan tentang peran guru dalam sistem pendidikan jelas menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab secara tidak proporsional dikaitkan dengan satu aktor, yaitu guru, untuk memastikan kualitas pendidikan. Bagaimanapun, semua komponen unit pendidikan, pemerintah pusat dan daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi, bertanggung jawab untuk memastikan kualitas pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan dan di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan kualitas pendidikan.

Hasil belajar cenderung menjadi isu kedua yang diangkat dalam menunjukkan kualitas pendidikan. Peserta mengutip beragam indikator kualitas pendidikan berdasarkan hasil belajar, termasuk: peserta didik yang memiliki kualifikasi dan keterampilan hidup; hasil ujian nasional; kriteria minimum untuk belajar tuntas (sebagaimana tercantum dalam kurikulum nasional); dan kompetensi siswa dalam literasi dan numerasi. Bagaimanapun, hasil ujian nasional disebutkan paling sering sebagai indikator hasil pendidikan

'Pertama, kualitas pendidikan dapat dilihat dari kompetensi siswa dalam menulis dan membaca. Kedua, kualitas pendidikan dapat dilihat ketika seorang siswa memiliki karakter yang mulia. Kemudian, kualitas pendidikan dapat dilihat ketika siswa memiliki kecakapan hidup' (seorang informan dari sebuah wawancara di Sumba Barat Daya).

Beberapa orang yang diwawancarai menyebutkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, tata kelola sekolah, karakteristik siswa atau dukungan orang tua dan masyarakat sebagai komponen lain yang memengaruhi kualitas pendidikan.

Perspektif yang beragam tentang kualitas pendidikan di antara para pemangku kepentingan menunjukkan kesenjangan pengetahuan mengenai definisi dan indikator kualitas pendidikan di Indonesia karena ini harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Perspektif yang beragam juga menunjukkan bahwa pemangku kepentingan lokal terutama tertarik pada bagian-bagian penyusun sistem pendidikan, baik dalam input maupun hasil pembelajaran. Namun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas guru di Sumba menjadi perhatian utama karena dampak potensialnya pada kualitas pendidikan. Temuan ini sejalan dengan fokus INOVASI pada peningkatan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Sumba. Para pemangku kepentingan tidak mengungkapkan perhatian besar pada keterampilan literasi dan numerasi sebagai indikator penting hasil Pendidikan. Hal ini menunjukkan perlunya mengangkat isu ini untuk meningkatkan kesadaran. Upaya meningkatkan literasi dan numerasi perlu menjadi prioritas, dan pemangku kepentingan perlu berkolaborasi dengan proyek INOVASI untuk mewujudkan hal ini.

4.2 ISU DAN TANTANGAN DI SUMBA

Menurut pemahaman pemangku kepentingan lokal tentang kualitas pendidikan, pendidikan di Sumba dikategorikan sebagai kualitas rendah dalam hal input, proses dan hasil. Perspektif pemangku kepentingan tentang kualitas pendidikan berpusat pada input pendidikan dan dalam membahas tantangan pendidikan, peserta juga sering menyebutkan input pendidikan. Studi ini mengidentifikasi sejumlah kekurangan dalam sistem pendidikan di Pulau Sumba.

Kekurangan dan distribusi guru yang tidak merata

Menurut alokasi pendidikan daerah 2017, rasio guru-siswa di empat kabupaten di Sumba memenuhi standar nasional dengan rasio 1:32, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Ini berarti bahwa keempat kabupaten tersebut memiliki cukup guru, terlepas dari status pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau guru kontrak. Namun demikian, sebagian besar yang diwawancarai menyatakan bahwa kabupaten di Sumba mengalami kekurangan guru, kecuali Sumba Tengah. Penting untuk dicatat bahwa pemangku kepentingan lokal hanya menghitung guru PNS dalam menilai angka, seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber:

'Masalah kami adalah ketersediaan guru PNS, di bawah 50 persen dari guru yang dibutuhkan di kabupaten ini' (seorang informan dari sebuah wawancara di Sumba Barat).

Dalam beberapa kasus sekolah mungkin hanya memiliki satu pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah sementara guru lainnya adalah guru sementara atau guru kontrak. Pemangku kepentingan lokal mengangkat masalah kekurangan guru dengan membedakan antara guru PNS dan guru kontrak. Kekhawatiran tentang keberlanjutan program guru kontrak untuk mengatasi permintaan guru mendasari sikap pemangku kepentingan lokal terhadap kekurangan guru.

Kekurangan guru tetap dianggap sebagai hasil dari moratorium rekrutmen pegawai negeri baru yang telah berlaku sejak tahun 2015. Ini dikombinasikan dengan pensiunnya guru yang akan datang yang mempengaruhi pasokan guru tetap di Pulau Sumba. Selain itu, distribusi guru yang tidak merata telah memperburuk kekurangan guru tetap di daerah pedesaan dan terpencil di Pulau Sumba. Sebagian besar yang diwawancarai mengakui bahwa guru lebih banyak didistribusikan di kota daripada di daerah pedesaan atau terpencil. Sumber yang diwawancarai menyatakan bahwa proses penempatan guru telah dipolitisasi dan hal ini berkontribusi pada ketidakmerataan dalam distribusi guru. Elite politik dan birokrasi lokal dapat mengintervensi penempatan guru demi kepentingan politik mereka sendiri. Selain itu, beberapa guru perempuan yang telah mengajar di daerah pedesaan selama beberapa tahun mungkin ingin ditempatkan di kota atau daerah lain di mana suami mereka bekerja.

Untuk mengatasi kekurangan dan ketidakseimbangan distribusi guru, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan program guru garis depan (GGD) yang bertujuan meningkatkan akses ke pendidikan dan mengatasi kekurangan guru di daerah Terdepan Terluar dan Tertinggal (3T) di Indonesia. Para guru untuk program ini direkrut melalui proses seleksi nasional dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil di Indonesia selama minimal sepuluh tahun atau sesuai dengan kebijakan lokal. Namun, beberapa pemangku kepentingan lokal menentang program ini karena sejumlah alasan. Pertama, mereka menganggap itu sebagai beban karena dana APBD harus dialokasikan untuk membayar akomodasi guru. Kedua, mencari rumah untuk disewa para guru ini sulit dan dengan adanya persyaratan minimum, seperti listrik, itu membatasi penempatan mereka di wilayah desa. Oleh karena itu, GGD cenderung tinggal di kota terdekat dan pulang pergi dari rumah ke sekolah. Situasi ini dianggap sebagai rintangan yang berarti di mana guru sering terlambat ke sekolah. Ketiga, sebagian besar GGD bukan asli Pulau Sumba sehingga mereka kesulitan mengajar siswa yang tidak fasih berbahasa Indonesia, terutama di kelas awal. Masalah ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Terakhir, menempatkan guru-guru yang bukan asli Sumba di pulau itu dapat menciptakan kecemburuan sosial di antara para guru lokal, khususnya di Sumba Barat Daya. Proses rekrutmen yang kompetitif menghalangi orang lokal untuk mengikuti program ini karena mereka tidak memenuhi persyaratan. Pelamar perlu mendapatkan sertifikat guru melalui program pelatihan profesional serta memiliki kualifikasi guru minimum.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemangku kepentingan lokal telah merekrut guru kontrak lokal menggunakan dana APBD atau BOS untuk memenuhi permintaan guru tetap. Strategi ini memberikan peluang kerja bagi penduduk setempat dan juga menghindari beberapa masalah dari para guru garis depan. Jelas, empat kabupaten di pulau Sumba lebih bergantung pada guru kontrak lokal untuk memenuhi permintaan akan guru.

Masalah guru: kualifikasi rendah, kompetensi kurang, dan gaji rendah

Walaupun mempekerjakan guru kontrak lokal tampak seperti strategi yang efektif untuk mengatasi kekurangan guru tetap, sistem pendidikan di Pulau Sumba telah mewarisi beberapa masalah sebagai hasil dari strategi ini. Masalahnya termasuk memiliki guru yang tidak memenuhi kualifikasi dengan kompetensi terbatas dan gaji rendah.

1. Guru yang tidak memenuhi kualifikasi:

- i. Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang guru, persyaratan umum untuk menjadi guru di Indonesia adalah: (1) memperoleh kualifikasi pendidikan minimum untuk gelar sarjana empat tahun atau program diploma empat tahun; (2) menunjukkan empat bidang kompetensi yang dibutuhkan -

pedagogis, pribadi, sosial dan profesional; dan (3) memperoleh sertifikasi guru. Namun, para pemangku kepentingan lokal di tingkat provinsi dan kabupaten mengakui bahwa banyak guru di Sumba tidak sepenuhnya mematuhi undang-undang dan tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Ini sesuai dengan data dari penempatan pendidikan daerah 2017 yang disajikan pada Tabel 3.1. Guru PNS yang direkrut pada tahun 1970-an kebanyakan adalah lulusan dari sekolah pendidikan guru (SPG) yang setara dengan tingkat sekolah menengah kejuruan. Demikian juga, sebagian besar guru kontrak lokal yang disewa oleh pemerintah daerah dan asisten guru yang disewa menggunakan bantuan operasional sekolah dalam beberapa tahun terakhir tidak memenuhi syarat karena mereka bukan lulusan program pendidikan guru profesional. Banyak guru kontrak hanya memiliki kualifikasi sekolah menengah.

- ii. Masalah guru yang tidak memenuhi kualifikasi masih ada di Pulau Sumba karena proses rekrutmen guru yang buruk. Pemerintah daerah secara langsung menunjuk guru kontrak sebagai guru tetap dalam perekrutan terakhir, berdasarkan tahun pengajaran mereka. Namun, sebagian besar guru ini tidak memiliki kualifikasi mengajar profesional. Juga, ada kekurangan orang dengan gelar sarjana di Pulau Sumba dan khususnya dengan gelar dalam pendidikan atau pengajaran sehingga pemerintah daerah terpaksa merekrut guru kontrak tanpa kualifikasi yang disyaratkan. Kekurangan dari sistem rekrutmen ini telah mengakibatkan rendahnya kualitas guru di kabupaten.

2. Kurangnya kompetensi guru

Karena banyak guru yang tidak memenuhi syarat, mereka tidak memiliki kompetensi pedagogis, pribadi, profesional dan sosial yang diperlukan. Narasumber yang diwawancarai dalam studi ini menyoroti beberapa masalah berikut.

- i. *Masalah kompetensi pedagogik guru:* Kompetensi pedagogis terdiri dari keterampilan utama berikut: kemampuan untuk memahami psikologi peserta didik dan memberdayakan mereka untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya melalui pembelajaran; dan kemampuan untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pendidikan dan pengajaran. Pemangku kepentingan lokal dalam studi ini mengamati bahwa banyak guru tidak memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi pendidikan atau keterampilan penting dalam mengidentifikasi strategi pengajaran yang tepat berdasarkan karakteristik dan tahapan perkembangan peserta didik. Guru yang lulus dari program pendidikan guru profesional harus memiliki pengetahuan dasar dan kompetensi ini meskipun pemangku kepentingan berpendapat bahwa bahkan lulusan dari kursus pelatihan guru pun mungkin tidak berpengalaman dalam psikologi pendidikan. Sama halnya, guru yang merupakan lulusan dari program disiplin lain atau sekolah menengah atas pun belum tentu memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan dalam hal ini.
- ii. Pemangku kepentingan lokal menekankan bahwa rencana pembelajaran yang buruk memengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran, yang mengakibatkan hasil pembelajaran yang buruk di empat kabupaten. Para pemangku kepentingan menyatakan bahwa sebagian besar guru tampaknya tidak mempersiapkan kegiatan belajar mengajar mereka dan tidak secara teratur menyusun rencana pembelajaran meskipun mereka telah dilatih untuk melakukan hal ini. Guru sering tidak sepenuhnya memahami proses yang dibutuhkan dalam mengembangkan rencana pembelajaran. Karena banyak guru yang tidak sepenuhnya menggunakan komputer, perlu waktu lebih lama untuk mengembangkan rencana pembelajaran ini secara manual dan beberapa guru hanya menggunakannya ketika pengawas sekolah berkunjung. Guru yang membuat rencana pembelajaran juga kemudian dapat menerapkan metode pengajaran yang berbeda di kelas. Pemangku kepentingan lokal mengindikasikan bahwa para guru menganggap rencana pembelajaran hanya sebagai dokumen untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk diverifikasi oleh pengawas sekolah. Ada juga indikasi bahwa beberapa guru hanya menyalin atau membeli rencana pembelajaran dari yang lain.
- iii. Mengenai Kurikulum 2013, guru dianggap belum siap untuk mengimplementasikan kurikulum karena belum semuanya dilatih. Perubahan kurikulum yang sering terjadi memengaruhi kesiapan guru untuk belajar, beradaptasi dan mengimplementasikan kurikulum dalam rencana pembelajaran mereka.

Selain itu, guru kelas satu hingga tiga membutuhkan kreativitas dan keterampilan pedagogis tingkat lanjut untuk menerapkan kurikulum baru karena menggunakan pendekatan pembelajaran integratif tematik untuk siswa di kelas satu hingga tiga.

- iv. *Masalah kompetensi pribadi guru:* Narasumber yang diwawancarai dalam studi ini juga mengkhawatirkan komitmen pribadi guru - khususnya motivasi atau hasrat mereka untuk mengajar dan masalah ketidaksiplinan. Praktisi pendidikan mengakui bahwa banyak guru tidak bangga dengan profesi mereka dan tidak menganggap peran yang mereka jalankan sebagai hal yang penting dalam sistem pendidikan. Gaji dan insentif yang relatif rendah untuk guru kontrak melatarbelakangi sikap yang semacam ini terhadap profesi guru.
- v. Masalah etika kerja guru juga muncul selama wawancara dan diskusi. Sebagian besar yang diwawancarai menekankan masalah ketidaksiplinan di kalangan para guru. Guru cenderung absen dari sekolah selama upacara adat atau karena cuaca buruk. Banyak guru datang terlambat atau meninggalkan sekolah lebih awal, sehingga mengurangi waktu belajar. Situasi ini terjadi karena banyak guru tinggal jauh dari sekolah mereka, di desa, di kecamatan atau bahkan di kota-kota kabupaten lainnya. Akibatnya, mereka harus menempuh perjalanan panjang ke sekolah setiap hari, kadang-kadang sejauh 30 km. Alasan mengapa guru tidak mau tinggal di dekat sekolah meliputi: kurangnya fasilitas, seperti listrik atau rumah kos untuk guru; dan para guru tidak bukanlah penduduk di desa-desa tempat sekolah itu berada. Selain itu, situasi ini juga menunjukkan kurangnya proses monitoring atas proses pendidikan di sekolah oleh pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah. Lokasi sekolah yang terpencil, medan berbukit dan infrastruktur jalan yang buruk adalah kendala tambahan yang berkontribusi pada kurangnya proses monitoring pendidikan di sekolah. Kegagalan dalam menegakkan peraturan, misalnya tentang masalah disiplin, berdampak pada profesionalisme dan kinerja guru.
- vi. *Kompetensi profesional:* Pemangku kepentingan lokal juga menemukan bahwa para guru tidak antusias untuk meningkatkan kompetensi mereka. Menurut UU No. 14 tahun 2005, guru yang memiliki sertifikasi guru dan memenuhi persyaratan tertentu berhak menerima insentif keuangan. Insentif ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan profesional guru. Namun, terlepas dari dukungan pemerintah, kemungkinan kecil para guru menggunakan insentif tersebut untuk meningkatkan kompetensi mereka. Juga, guru cenderung tidak menggunakan metode teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk belajar atau meningkatkan kompetensi mereka. Guru berusia di atas 50 tahun sebagian besar tidak bisa menggunakan komputer, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mempersiapkan rencana pembelajaran. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada operator DAPODIK untuk membantu mereka dalam semua tugas yang membutuhkan keterampilan komputer. Selain itu, studi baseline kuantitatif di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya pada 2018 menemukan bahwa tingkat literasi guru sangat rendah di kedua kabupaten tersebut..

3. Kesenjangan pendapatan

Meskipun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gaji guru berdasarkan kualifikasi dan status sertifikasi mereka patut dipuji, hal ini telah menciptakan perbedaan pendapatan antara guru yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Kesenjangan ini bahkan lebih lebar antara guru PNS bersertifikat dan guru kontrak atau guru yang dibayar dari bantuan operasional sekolah (BOS). Sebagai contoh, seorang guru kontrak yang dibayar dari APBD dapat memperoleh Rp. 1,500,000 per bulan sementara guru kontrak yang dipekerjakan menggunakan dana BOS hanya memperoleh Rp. 250,000 – 750,000 per bulan. Selain itu, guru kontrak yang dipekerjakan menggunakan dana BOS bahkan tidak dibayar dalam jangka waktu penggajian secara rutin. Jelas bahwa para guru kontrak cenderung menerima gaji rendah yang tidak bisa menutupi biaya hidup mereka. Bahkan biaya transportasi guru pun bisa jadi melebihi pendapatan mereka.

Dalam wawancara, para pemangku kepentingan lokal berpendapat bahwa situasi ini pasti memengaruhi motivasi dan kinerja guru kontrak. Perwakilan PGRI berpendapat bahwa meningkatkan gaji guru kontrak akan memotivasi mereka dan ini merupakan prasyarat untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Serikat guru telah

mengadvokasi pemerintah daerah untuk menaikkan gaji guru kontrak tetapi kendala keuangan (rendahnya Pendapatan Asli Pemerintah Daerah) tidak memungkinkan mereka melakukan hal tersebut hingga sekarang.

4. Proses pembelajaran tidak efektif

Metode belajar mengajar

- i. Kurikulum adalah aspek penting dalam proses pendidikan karena menentukan bagaimana pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan ditransmisikan kepada siswa. Kurikulum adalah sebuah fondasi yang memandu pengembangan metode belajar mengajar. Studi ini menemukan bahwa guru menggunakan kurikulum yang berbeda - biasanya kurikulum berbasis sekolah atau Kurikulum 2013. Ini karena tidak semua guru telah dilatih untuk menggunakan Kurikulum 2013.
- ii. Metode pengajaran yang digunakan umumnya tidak kreatif dan menyenangkan karena kurangnya persiapan. Terlepas dari ketersediaan alat bantu belajar di sekolah-sekolah tertentu, guru cenderung tidak menggunakan fasilitas tersebut untuk meningkatkan proses belajar mengajar, seperti yang dikatakan oleh salah satu pemangku kepentingan:

'Guru cenderung tidak menggunakan alat belajar dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran ...' (pemangku kepentingan di Sumba Tengah).

- iii. Beberapa pemangku kepentingan prihatin dengan masalah perlindungan anak sehubungan dengan guru yang menggunakan hukuman fisik di sekolah. Ini dapat memengaruhi kehadiran siswa di sekolah karena beberapa siswa mungkin takut pada guru mereka. Ini juga memengaruhi hubungan guru-siswa di kelas, serta hubungan antara guru dan orang tua karena orang tua tidak menyetujui hukuman fisik yang diterapkan terhadap anak-anak mereka. Namun, beberapa praktisi pendidikan menganggap perlindungan anak menjadi kendala bagi guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah atau selama proses pembelajaran. Perspektif yang berbeda mengenai hukuman fisik dan perlindungan anak menunjukkan perlunya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guru dalam menerapkan praktik disiplin positif untuk mendorong proses pembelajaran yang positif dan efektif.

5. Penilaian pembelajaran siswa

Pemangku kepentingan menunjukkan masalah dalam praktik penilaian pembelajaran siswa yang memengaruhi kualitas pendidikan di Sumba. Mereka melihat bahwa beberapa guru membiarkan siswa naik ke kelas berikutnya di sekolah bahkan ketika siswa tidak dapat membaca, menulis, atau berhitung. Praktik ini berakar pada persepsi guru bahwa 'semua siswa SD harus dinaikkan ke kelas berikutnya'. Dengan kata lain, tidak naik kelas tidak diperbolehkan terjadi di SD. Perubahan dalam metode penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran siswa di bawah Kurikulum 2013 mendukung persepsi dan praktik guru, dan menghasilkan kenaikan kelas untuk semua siswa. Di bawah Kurikulum 2013, siswa dinilai secara holistik, berdasarkan berbagai aspek seperti sikap, penyesuaian sosial, pengetahuan dan keterampilan. Ini membedakan Kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya yang hanya berfokus pada pengetahuan. Namun, metode penilaian holistik berarti bahwa anak-anak SD dengan prestasi rendah dapat naik kelas dengan tindakan perbaikan yang direkomendasikan. Perubahan dalam metode penilaian dimaksudkan untuk mengembangkan potensi anak-anak di tingkat SD, yaitu 'masa keemasan' masa kanak-kanak. Kebingungan tentang metode penilaian di antara para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa niat baik dari penilaian tersebut belum sepenuhnya dipahami dalam praktiknya.

Selain itu, guru cenderung menerapkan praktik buruk dalam menilai dan memberikan umpan balik pada pembelajaran siswa. Misalnya, guru tidak berupaya untuk memberikan umpan balik tentang tugas siswa atau bahkan untuk mengoreksi anak-anak ketika mereka membaca atau menulis. Akhirnya, kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua untuk membahas kemajuan siswa di sekolah juga dipandang memengaruhi kualitas pendidikan secara negatif.

6. Ukuran kelas

Beberapa peserta dalam studi ini menyebutkan masalah dalam rasio siswa:guru di kelas pendidikan agama karena jumlah guru sangat sedikit. Di sekolah swasta, rasio guru:siswa bisa lebih dari 40 siswa per guru karena terbatasnya jumlah ruang kelas. Situasi ini dapat mengurangi efektivitas proses pembelajaran.

7. Sarana/fasilitas sekolah tidak memadai dan prasarana/infrastruktur buruk

Fasilitas sekolah yang tidak memadai merupakan hambatan tambahan terhadap kualitas pendidikan. Pemangku kepentingan menyebutkan beberapa masalah dengan fasilitas sekolah. Pertama, sekolah-sekolah di Sumba kesulitan menyediakan buku pelajaran untuk menerapkan Kurikulum 2013 karena kekurangan dari pemasok atau penerbit. Diperlukan waktu dua tahun bagi sekolah untuk mendapatkan beberapa buku pelajaran meskipun sekolah memiliki dana anggaran yang tersedia melalui dana BOS mereka. Ini menciptakan hambatan bagi para guru yang mencoba menerapkan kurikulum baru. Alat belajar yang tidak memadai juga ditemui selama studi ini. Mengenai literasi dan numerasi, sebagian besar sekolah di Sumba tidak memiliki perpustakaan untuk mempromosikan budaya membaca di sekolah. Beberapa sekolah memiliki perpustakaan tetapi perpustakaan tidak berfungsi dengan baik tanpa pustakawan atau guru yang ditugaskan untuk membantu anak-anak mengakses dan memahami buku-buku yang tersedia di perpustakaan.

8. Prasarana/infrastruktur tidak memadai dan berkualitas rendah

Sebagian besar yang diwawancarai percaya bahwa memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai dan berkualitas tinggi memengaruhi proses pembelajaran dan hasil pendidikan. Namun, infrastruktur di empat kabupaten di Sumba digambarkan tidak memadai dan berkualitas rendah. Masalah infrastruktur tetap ada di semua kabupaten di Pulau Sumba karena terbatasnya dana APBD untuk pembangunan infrastruktur sekolah secara bersamaan. Akibatnya, pengembangan infrastruktur sekolah tetap menjadi perhatian utama bagi perencanaan pembangunan setiap tahun.

Terbatasnya dana APBD memaksa pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program pembangunan berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Namun, data yang tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan terkait kebutuhan di setiap sekolah menyulitkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sekolah. Di sektor pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 79 tahun 2015 tentang sistem manajemen data, menjelaskan portal data pendidikan penting, yang dikenal sebagai DAPODIK, yang menyediakan informasi tentang situasi sekolah di Indonesia. DAPODIK mencatat data terkait guru dan staf, data siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah dan program sekolah. Data tersebut diharapkan dapat mendukung para pembuat kebijakan dalam mengembangkan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan. Namun demikian, keakuratan data tersebut diperdebatkan oleh pemangku kepentingan lokal, terutama oleh Bappeda. Oleh karena itu, Bappeda di Sumba Barat telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan sistem manajemen data lain untuk mencatat kebutuhan masing-masing sekolah di kabupaten tersebut.

9. Kompetensi rendah dalam literasi dan numerasi (masalah dengan hasil pendidikan)

Dalam hal hasil pendidikan, sebagian besar pemangku kepentingan lokal tidak menyebutkan masalah rendahnya kompetensi literasi dan numerasi di antara siswa SD. Mereka hanya menyebutkannya jika pewawancara mengajukan pertanyaan ini. Ini mungkin tidak menjadi perhatian bagi sebagian besar pemangku kepentingan karena persepsi mereka bahwa kualitas hasil pendidikan cukup diwakili oleh hasil ujian nasional dan hasil lainnya, seperti keterampilan hidup siswa dan karakter mulia, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Ada persepsi bahwa faktor penentu literasi dan numerasi merupakan istilah teknis yang hanya sepenuhnya dipahami oleh praktisi pendidikan. Akibatnya, para pemangku kepentingan tidak mungkin menyebutkan kompetensi literasi dan numerasi dalam membahas hasil pendidikan. Juga disebutkan bahwa kurangnya data yang tersedia secara teratur tentang kompetensi literasi dan numerasi anak-anak memengaruhi perhatian pemerintah daerah tentang masalah ini.

Namun, beberapa pemangku kepentingan yang sering terlibat dalam atau terpapar dengan studi ACDP (2016) menegaskan bahwa kualitas pendidikan dasar di Sumba dicirikan oleh rendahnya kompetensi literasi dan numerasi di antara siswa di kelas satu hingga tiga. Beberapa siswa di kelas lima dan enam akibatnya masih

harus mengeja kata-kata saat membaca. Studi baseline kuantitatif yang baru-baru ini dilakukan pada tahun 2018 di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya oleh tim INOVASI juga menemukan bahwa lebih dari separuh siswa di Nusa Tenggara Timur tidak lulus tes huruf, suku kata dan identifikasi kata, sehingga perlu bagi mereka untuk mengambil tes pra-literasi. Sebuah studi oleh William Touisuta Associates (WTA 2009) di Sumba Tengah juga menemukan bahwa masalah tersebut masih ada, sebagaimana salah satu peserta dalam studi ini berkomentar:

'Menurut penelitian oleh WTA (di Sumba Tengah), ... sekitar 53 persen siswa kelas awal tidak dapat membaca. Kami belum mengukur kompetensi membaca lainnya seperti pemahaman tentang konten membaca, tetapi, bahkan pada tingkat mengenal huruf, atau kemampuan membaca ... [kompetensi] masih sangat rendah' (FGD kelompok B, Sumba Tengah).

Pemangku kepentingan juga menyoroti perbedaan antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan. Jumlah anak yang tidak dapat membaca lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan dengan di kota. Menariknya, siswa yang telah mengikuti PAUD menunjukkan hasil yang lebih baik dalam literasi dan numerasi daripada yang lain karena mereka telah terpapar dengan huruf dan angka pada tahap awal.

Masalah literasi ini diakui sebagai penghalang bagi anak-anak untuk memahami konten pengajaran, literatur dan memahami pertanyaan dan instruksi untuk pekerjaan rumah atau ujian. Hambatan ini menghasilkan terbatasnya hasil pendidikan di antara siswa kelas awal. Telah disebutkan bahwa kurangnya kompetensi guru dalam mengajar siswa kelas awal, proses pembelajaran yang tidak efektif dan hambatan bahasa adalah akar dari masalah dalam literasi dan numerasi. Selain itu, lingkungan pendidikan tidak kondusif untuk mempromosikan kebiasaan membaca di kalangan siswa, karena fasilitas yang tidak memadai, seperti koleksi buku yang terbatas dan kurangnya perpustakaan.

Meskipun sebagian besar pemangku kepentingan tampaknya kurang sadar akan masalah literasi dan numerasi di Sumba, beberapa kebijakan dan program telah diterapkan untuk mengatasi tingkat literasi dan numerasi yang rendah di empat kabupaten. Studi ACDP (2016), dikombinasikan dengan strategi nasional untuk meningkatkan literasi dan numerasi, meyakinkan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah di Sumba. Jelas, studi ACDP (2016) memberikan bukti untuk meyakinkan dan mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah literasi dan numerasi. ACDP membangun minat pemangku kepentingan lokal dalam masalah pendidikan di Sumba melalui advokasi berbasis bukti. Mereka mengumpulkan para pemangku kepentingan lokal di empat kabupaten di Sumba dan berbagi informasi mengenai studi mereka yang menemukan rendahnya keterampilan literasi dan numerasi di kalangan siswa kelas satu hingga tiga di Sumba. Tim ACDP kemudian mengadvokasi temuan mereka di kalangan para pembuat kebijakan sehingga usul mereka ditambahkan ke dalam agenda prioritas para pembuat kebijakan. Strategi advokasi yang digunakan oleh ACDP telah menyebabkan perubahan dalam anggaran dan prioritas program di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil studi ACDP mendorong pemangku kepentingan lokal untuk mendirikan Forum Peduli Pendidikan Sumba - FPPS Sumba, yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan di Sumba dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan.

10. Karakteristik pelajar

Studi ini mengidentifikasi beberapa masalah siswa yang berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan, sebagai berikut.

Pengetahuan awal tentang huruf dan angka: Sejumlah siswa kelas satu tidak pernah mengikuti PAUD atau taman kanak-kanak, sehingga mereka kurang terpapar dengan huruf dan angka. Temuan ini dikonfirmasi oleh data tentang pendaftaran PAUD pada **Gambar 1**. Telah dikemukakan bahwa siswa yang mengikuti PAUD atau taman kanak-kanak menunjukkan hasil lebih baik dalam literasi dan numerasi daripada siswa yang lainnya di kelas satu. Alhasil, pemerintah daerah fokus pada peningkatan akses ke PAUD untuk mengatasi masalah literasi dan numerasi di Sumba.

Hambatan Bahasa: Sebagian besar anak-anak di Sumba menggunakan bahasa ibu mereka setiap hari sehingga anak-anak menghadapi kesulitan di kelas awal karena guru menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Ini menciptakan tantangan lain karena guru harus dapat mengajar dengan mengkombinasikan bahasa ibu anak-anak dengan Bahasa Indonesia untuk membantu mereka memahami konten pelajaran. Kegagalan untuk menggunakan metode pembelajaran bilingual telah diakui berhubungan dengan masalah literasi dan numerasi di Sumba. Hambatan bahasa lebih buruk di Sumba Barat karena setiap kecamatan memiliki bahasa asli yang berbeda. Oleh karena itu, guru untuk kelas satu hingga tiga diharapkan dapat mengkombinasikan bahasa daerah dan Bahasa Indonesia selama kelas mereka.

Pekerja anak: Ini dianggap sebagai fenomena umum di empat kabupaten di Sumba. Anak-anak bekerja di sawah untuk membantu orang tua mereka atau bahkan bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan uang. Seperti yang dikatakan salah satu peserta di Sumba Tengah dalam FGD:

'Pembayaran harian untuk menanam sawah bisa mencapai Rp 50.000 per orang ... anak-anak dapat menerima permen, kemudian mendapat Rp 20.000 hingga Rp 25.000 untuk pekerjaan paruh waktu' (peserta FGD kelompok B, Sumba Tengah).

Masalah lain di Sumba adalah sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi dua kasta yang berbeda, yaitu kasta *maramba*, merujuk pada tuan, dan kasta *ata*, mengacu pada hamba. Mengabaikan tren saat ini, sistem kasta ini bertahan di Sumba, khususnya di Sumba Timur dan Sumba Tengah. Sejalan dengan sistem kasta, masalah pekerja anak lebih buruk di kalangan anak-anak yang dianggap berasal dari kasta hamba karena mereka berkewajiban bekerja untuk tuan mereka. Anak-anak sering bekerja setelah sekolah atau absen dari sekolah. Tingkat absensi yang tinggi terjadi selama masa tanam dan panen. Selain itu, anak-anak tidak dapat berkonsentrasi di sekolah karena kelelahan. Anak-anak juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar di rumah. Menariknya, pekerja anak tidak dianggap sebagai masalah sehubungan dengan kualitas pendidikan karena praktik ini sangat umum di masyarakat. Perbedaan perspektif tentang definisi pekerja anak dan implikasinya terhadap kinerja anak-anak dalam pendidikan menjelaskan sikap para pemangku kepentingan terhadap masalah ini.

Akhirnya, **efek jangka panjang dari kekurangan gizi** di kalangan anak-anak di Sumba memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi di kelas. Para pemangku kepentingan menyebutkan bahwa sebagian besar anak-anak di Sumba tidak makan sarapan sebelum sekolah dan ini memengaruhi performa mereka di sekolah. Situasi ini akan menghambat implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2017 tentang sekolah sehari penuh.

11. Masalah tata kelola sekolah

Manajemen sekolah yang efektif memengaruhi kualitas pendidikan. Manajemen yang efektif menempatkan lebih banyak penekanan pada kualitas kepala sekolah sebagai pemimpin para guru dan sebagai pengelola semua kebutuhan sekolah. Pemangku kepentingan lokal, khususnya di Sumba Barat dan Sumba Tengah, sering mengangkat masalah kurangnya tata kelola sekolah. Yang pertama adalah kurangnya keterampilan manajemen di antara kepala sekolah. Para pemangku kepentingan menekankan bahwa kurangnya kepemimpinan dan pengawasan kepala sekolah berkontribusi pada masalah ketidakdisiplinan di antara siswa dan guru, serta terhadap kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Karena kepala sekolah tidak mengawasi guru mereka, mereka tidak menyadari bahwa guru mereka memiliki masalah dan mungkin perlu meningkatkan kompetensi mereka. Kepala sekolah kemungkinan kecil memantau apakah guru menyiapkan dan menerapkan rencana pelajaran mereka atau tidak. Pemangku kepentingan mengemukakan bahwa kepala sekolah tampak kacau dalam mengelola perekrutan guru kontrak yang dipekerjakan menggunakan dana BOS. Tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa guru kontrak dipekerjakan atau kontrak mereka diputus. Selain itu, akurasi DAPODIK juga muncul sebagai masalah terkait dengan kemampuan kepala sekolah untuk mengawasi operator data.

Selain masalah kompetensi, pemangku kepentingan di Sumba Barat melaporkan kurangnya penduduk lokal yang berpotensi untuk direkrut sebagai kepala sekolah. Situasi ini merupakan konsekuensi lain dari kekurangan guru PNS permanen di Sumba Barat. Meskipun pemerintah telah mengembangkan pedoman untuk merekrut kepala sekolah, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 tahun 2007, para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten mengangkat masalah terkait dengan mekanisme perekrutan kepala sekolah yang buruk. Mereka mengemukakan adanya kriteria yang tidak jelas dalam proses seleksi dan rekrutmen. Satu orang menyebutkan bahwa kepala sekolah dapat mempertahankan posisi mereka sampai mereka pensiun. Ada indikasi bahwa proses perekrutan dan penunjukan kepala sekolah telah dipolitisasi. Karena proses ini dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, elite politik dan birokrasi lokal dapat menyalahgunakan wewenang mereka untuk campur tangan dalam proses tersebut demi kepentingan politik mereka sendiri. Lebih lanjut, pelatihan yang tidak memadai untuk kepala sekolah disebutkan sebagai penyebab kurangnya kompetensi kepala sekolah.

12. Aksesibilitas pendidikan

Salah satu tujuan dari studi ini adalah untuk menggambarkan situasi akses universal ke pendidikan untuk semua anak di Sumba, tanpa memandang jenis kelamin, kelas sosial, etnis, latar belakang atau ketidakmampuan mereka.

13. Akses yang setara ke pendidikan dasar untuk anak laki-laki dan perempuan

Sebagian besar pemangku kepentingan lokal dalam studi ini merasa bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama ke pendidikan dasar. Temuan ini dikonfirmasi oleh laporan statistik pendidikan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2017 (Kemendikbud 2017). Lebih lanjut tren performa pendidikan menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki performa lebih baik daripada anak laki-laki. Ini menunjukkan pergeseran dalam perspektif dan sikap masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Namun, kesenjangan antara anak laki-laki dan perempuan tetap ada di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Laporan statistik pendidikan provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di antara anak laki-laki berusia 16-18 tahun lebih rendah daripada anak perempuan dalam kelompok usia ini. Situasi ini adalah hasil dari angka putus sekolah menengah yang lebih tinggi di antara anak laki-laki.

Terlepas dari tumbuhnya kesadaran kesetaraan gender dalam masyarakat Sumba, beberapa pemangku kepentingan yang diwawancarai di Sumba Timur dan Sumba Barat mengutip kasus-kasus di mana orang tua lebih memilih anak laki-laki untuk mengejar pendidikan tinggi daripada anak perempuan. Ini lebih mungkin terjadi di daerah pedesaan atau keluarga dengan status ekonomi rendah. Temuan ini menggarisbawahi statistik provinsi yang menyoroti kesenjangan gender dalam pendidikan tinggi di provinsi tersebut (Kemendikbud 2017). Perspektif gender tradisional tentang peran perempuan dalam masyarakat dan keluarga melatarbelakangi sikap ini. Perspektif ini menghalangi orang tua dari mendaftarkan anak perempuan di pendidikan tinggi. Dalam konteks Sumba Timur, pernikahan dini juga mencegah anak perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi.

14. Akses pendidikan yang tidak tersedia atau tidak memadai untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus

Sekolah Luar Biasa untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus terletak di Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat. Namun, di Sumba Barat Daya, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau difabel tidak memiliki akses ke pendidikan inklusif atau reguler meskipun sejumlah anak-anak difabel tinggal di daerah tersebut. Kita perlu mencatat bahwa pemerintah kabupaten dan provinsi di Sumba sedang dalam proses mengalihkan kewenangan dari kabupaten ke pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengelola sekolah menengah dan pendidikan informal (termasuk pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus) setelah dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014. Masa transisi ini memengaruhi layanan pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Setelah dikeluarkannya undang-undang, rencana untuk membangun sekolah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus di Sumba Barat Daya harus ditunda.

Meskipun sekolah luar biasa untuk anak berkebutuhan khusus telah didirikan di tiga kabupaten lain, semua anak berkebutuhan khusus di kabupaten ini bukan berarti memiliki akses ke pendidikan atau menerima pendidikan yang berkualitas. Penghargaan orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka serta tingkat pendidikan dan status ekonomi mereka sendiri memengaruhi tingkat pendaftaran di sekolah-sekolah ini. Dalam hal kualitas pendidikan, sekolah luar biasa kebanyakan mempekerjakan guru reguler tanpa kualifikasi khusus untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jarak ke sekolah juga menghalangi orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah. Walaupun Pemerintah Daerah berusaha menyediakan sekolah inklusi, hanya beberapa guru yang memiliki kualifikasi untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus di kelas reguler sehingga menghambat penyebaran sekolah inklusi.

15. Marapu: Keyakinan leluhur Sumba tidak diakui oleh sistem pendidikan

Ada sekelompok besar pengikut Marapu di Sumba yang ingin kepercayaan mereka diakui oleh pemerintah daerah, regional dan nasional. Mereka menganggap anak-anak mereka rentan untuk pindah agama/keyakinan dalam sistem pendidikan saat ini. Siswa Marapu terabaikan selama pelajaran pendidikan agama di sekolah karena tidak ada guru yang dapat mengajarkan keyakinan Marapu. Akibatnya, para siswa memutuskan untuk mengikuti pelajaran agama dari agama mayoritas lainnya di sekolah.

16. Hambatan topografi memengaruhi partisipasi siswa

Topografi Pulau Sumba telah menjadi penghalang untuk meningkatkan akses dan partisipasi anak-anak dalam pendidikan. Pemangku kepentingan mengemukakan bahwa para siswa sering berjalan jauh ke sekolah (5-7km) melalui daerah berbukit dan pegunungan. Ini memengaruhi partisipasi mereka di sekolah, khususnya di kelas awal. Siswa lelah dan tidak bisa berkonsentrasi. Juga diindikasikan bahwa tingginya tingkat absensi siswa yang dikombinasikan dengan kurangnya konsentrasi di kelas menyebabkan rendahnya tingkat literasi dan numerasi di kelas-kelas awal. Pemerintah daerah telah mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan sekolah paralel atau filial, terutama untuk kelas satu hingga tiga. Sekolah filial adalah cabang kecil dari sekolah utama yang telah didirikan di daerah terpencil untuk meningkatkan pendaftaran dan kehadiran sekolah.

17. Efek dari sistem kasta pada akses anak-anak ke pendidikan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem kasta di Sumba membagi orang menjadi '*maramba*' (tuan) dan '*ata*' (hamba). Anak-anak dari kasta hamba tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan tinggi karena status sosial mereka. Meskipun masalah ini jarang terjadi, beberapa pemangku kepentingan masih mengakui implikasi sistem ini untuk pendidikan anak-anak:

'Tuan mereka mungkin tidak mengizinkan mereka mengejar pendidikan tinggi. Misalnya, ketika anak-anak di kelas enam, kadang-kadang mereka tidak dapat mengikuti ujian akhir atau tidak dapat mendaftar di sekolah menengah pertama setelah menyelesaikan SD. Ada persepsi bahwa anak-anak dapat menjadi penghalang bagi tuan mereka begitu mereka memperoleh gelar pendidikan yang lebih tinggi' (wawancara informan di Sumba Tengah).

Selain itu, anak-anak dari kasta hamba cenderung bergantung pada tuannya untuk membayar biaya pendidikan mereka. Beberapa pemangku kepentingan di Sumba Tengah dan Sumba Timur mengakui bahwa meskipun praktik ini jarang terjadi, hubungan tuan-hamba ini tetap ada. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari kasta hamba dapat mengejar pendidikan tinggi, seperti anak-anak tuan mereka, karena mereka diharapkan untuk menemani dan melayani anak-anak tuan mereka selama pendidikan mereka. Beberapa anak dari kasta hamba mampu menempuh pendidikan tinggi sendiri, tetapi mereka tidak mungkin kembali ke Sumba untuk memulai kembali status mereka yang kurang beruntung di masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan akses yang tidak merata ke pendidikan untuk semua anak di Sumba. Anak perempuan di Sumba tetap dirugikan dalam mengakses pendidikan tinggi. Anak-anak difabel di Sumba memiliki akses terbatas ke pendidikan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang persamaan hak mereka atas pendidikan, prioritas pemerintah dan kurangnya guru yang terlatih. Selain itu, anak-anak

Marapu dan kasta hamba tetap rentan dalam sistem pendidikan di Sumba. Oleh karena itu, kita perlu terus meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini dan menggerakkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendidikan bagi semua anak.

18. Faktor-faktor di luar lingkungan sekolah yang menghambat kualitas pendidikan

Faktor-faktor penghambat kualitas pendidikan di Sumba lainnya diidentifikasi dalam studi baseline ini seperti yang dijelaskan dalam bagian ini.

19. Redahnya nilai pengasuhan dan kepedulian terhadap pendidikan anak-anak

Dalam studi ini orang tua sering digambarkan tidak mendukung pendidikan anak-anak mereka. Pertama, mereka menganggap pendidikan tidak sepenting jika anak-anak mereka bekerja di ladang atau di tempat lain untuk membantu orang tua dan keluarga mereka. Masalah ekonomi keluarga mendasari sikap orang tua terhadap pendidikan. Kebanyakan orang tua menganggap lulus dari sekolah menengah atas sebagai pendidikan yang memadai untuk anak-anak mereka. Situasi ini lebih lazim di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Orang tua di daerah pedesaan cenderung tidak memotivasi anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah; mengawasi pekerjaan rumah anak-anak mereka; dan memastikan anak-anak sarapan sebelum sekolah dan sampai di sekolah tepat waktu. Pemangku kepentingan lokal di Sumba Tengah lebih menekankan pada kurangnya dukungan orang tua untuk pendidikan anak-anak dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumba. Mereka menganggap dukungan orang tua sebagai masalah utama bagi kualitas pendidikan di Sumba Tengah.

Sementara itu, beberapa orang tua perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka. Misalnya, mengingat jarak ke sekolah, orang tua sering berbagi tanggung jawab untuk pendidikan anak dengan keluarga besar mereka. Orang tua yang tinggal di daerah pedesaan sering mengirim anak-anak mereka untuk tinggal bersama anggota keluarga besar untuk akses yang lebih baik ke pendidikan. Dalam beberapa kasus, keluarga besar bertanggung jawab untuk mendukung biaya hidup sehari-hari anak-anak. Praktek ini biasa terjadi di masyarakat Sumba. Sebagai gantinya, anak-anak diharapkan untuk membantu keluarga besar, yang membuat mereka rentan terhadap masalah pekerja anak yang sekali lagi dapat memengaruhi kualitas pendidikan.

Orang-orang lebih menghargai upacara adat yang rumit dan mahal dibandingkan pendidikan anak-anak

- i. Pemangku kepentingan lokal mengakui bahwa upacara adat yang mahal telah menjadi penghambat kualitas pendidikan di Sumba dan bahkan dapat memiliki efek negatif pada kesehatan masyarakat. Upacara ini berdampak pada anggaran rumah tangga dan orang tua memprioritaskan upacara adat ini dibanding pendidikan anak-anak mereka. Sebagai contoh, sebuah keluarga dapat menghabiskan Rp. 25-50 juta untuk membeli hewan untuk upacara tetapi hanya menghabiskan sebagian dari itu untuk sekolah anak-anak mereka. Orang-orang berada di bawah tekanan dan merasa akan dipermalukan jika mereka tidak mengadakan upacara adat yang rumit ini. Namun, mereka tidak merasakan tekanan yang sama supaya anak-anak mereka mengejar pendidikan tinggi. Akibatnya, banyak anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, anak-anak mewarisi hutang dari orang tua mereka karena upacara yang mahal ini, membuat anak-anak rentan jatuh ke dalam kemiskinan.
- ii. Upacara adat ini juga memengaruhi tingkat absensi siswa di sekolah. Anak-anak yang lebih besar diminta untuk membantu selama upacara yang dapat berlangsung hingga tujuh hari.
'Dari Oktober hingga awal November, ada banyak upacara anak-anak, pasti jumlah siswa [turun] dibandingkan bulan-bulan lainnya. Jika ada 500 siswa di sekolah, mungkin hanya 300 hingga 400 siswa yang bersekolah' (informan wawancara, Sumba Barat Daya)
- iii. Terlepas dari dampak upacara adat pada pendidikan di Sumba, semua peserta dalam studi ini berpendapat bahwa upacara di Sumba perlu dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya

masyarakat. Mereka menyarankan bahwa menyederhanakan upacara atau membatasi jumlah hewan kurban akan menciptakan solusi *win-win* untuk melestarikan budaya tetapi mengurangi dampaknya terhadap pendidikan anak-anak. Namun, ini belum diatasi, kecuali di Sumba Tengah. Gagasan itu tampaknya masih jauh dari tercapai karena memerlukan komitmen yang konsisten dari seluruh masyarakat untuk menyetujui dan berupaya menyederhanakan upacara-upacara ini.

Tiga intervensi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan

Peserta diminta untuk mengusulkan tiga masalah utama yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Sumba, seperti yang disajikan pada Tabel 4.1. Ada konsensus bahwa peningkatan kualitas guru adalah prioritas utama bagi para pemangku kepentingan lokal, kecuali di Sumba Tengah di mana dukungan orang tua muncul sebagai prioritas utama. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kepentingan dan prioritas pemangku kepentingan lokal bertepatan dengan fokus INOVASI.

Tabel 8. Tiga intervensi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba

No	Sumba Barat Daya	Sumba Barat	Sumba Tengah	Sumba Timur
1	<p>Guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi guru dan memenuhi permintaan untuk guru PNS • Meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru 	<p>Guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi guru dan memenuhi permintaan untuk guru PNS • Meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru 	<p>Dukungan orang tua untuk pendidikan siswa</p>	<p>Guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi guru dan memenuhi permintaan untuk guru PNS • Meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru
2	<p>Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi</p>	<p>Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi</p>	<p>Guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi guru dan memenuhi permintaan untuk guru PNS • Meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru 	<p>Meningkatkan kualitas kepala sekolah</p>
3	<p>Memenuhi alokasi APBD 20% untuk pendidikan</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana</p>

Pembahasan

Temuan studi tentang masalah dan tantangan pendidikan dasar di Sumba menunjukkan bahwa masalah tersebut berasal dari guru yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Buruknya proses rekrutmen dan distribusi guru tetap yang tidak merata merupakan penyebab utama masalah guru ini, yang berdampak negatif pada proses pembelajaran. Ini pada gilirannya menghasilkan kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran yang rendah di Sumba. Demikian juga, keterampilan manajemen dan pengawasan kepala sekolah yang terbatas telah berkontribusi pada tata kelola sekolah yang lemah dan kualitas pendidikan yang

rendah. Infrastruktur dan fasilitas sekolah yang tidak memadai tetap menjadi masalah karena terbatasnya dana APBD. Menggarisbawahi pentingnya guru dan kepala sekolah sebagai input yang memungkinkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kita perlu mengembangkan intervensi atau program untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah di Sumba.

Hasil literasi dan numerasi tidak memenuhi standar yang diinginkan di Sumba. Angka literasi dan numerasi yang rendah ini diakui sebagai hambatan untuk pembelajaran anak-anak dan pemahaman mereka secara keseluruhan tentang konten pengajaran dan literatur serta pemahaman mereka tentang pertanyaan dan instruksi kelas.

Studi ini juga mencatat beberapa hambatan siswa yang berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan. Hambatan-hambatan ini meliputi: kurangnya pengetahuan tentang huruf dan angka; hambatan bahasa; pekerja anak; dan nutrisi anak yang memengaruhi kesiapan anak untuk belajar di kelas. Hambatan ini harus dipertimbangkan ketika program sedang dikembangkan untuk mengatasi masalah pendidikan di Sumba. Program untuk meningkatkan kapasitas guru harus membekali guru dengan metode pengajaran yang efektif yang meminimalkan efek hambatan bahasa. Intervensi program untuk guru kelas satu hingga tiga juga harus fokus pada kompetensi guru dalam mengajar literasi dan numerasi.

Studi ini menyoroti beberapa faktor kontekstual yang mengakibatkan akses pendidikan yang tidak merata bagi semua anak. Faktor-faktor ini mencakup: tidak tersedianya sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di Sumba Barat; perspektif peran gender tradisional di kalangan publik; kurangnya pengajaran agama untuk pengikut keyakinan Marapu; dan konstruksi sosial terkait dengan sistem kasta yang menonjol di Sumba Timur dan Sumba Tengah. Kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat juga berdampak negatif pada kualitas pendidikan di Sumba.

4.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR

Bagian ini membahas tindakan strategis saat ini yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lokal untuk menangani masalah pendidikan di Sumba dan arah program Pemerintah Daerah di masa depan untuk meningkatkan hasil pembelajaran di Sumba.

FPPS sebagai gerakan lokal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Sumba

Studi ACDP (2016) di Sumba mengungkapkan masalah kualitas pendidikan di pulau itu, termasuk rendahnya kualitas guru dan rendahnya tingkat literasi dan numerasi di kalangan siswa kelas awal. Temuan ini mendorong pemerintah daerah di empat kabupaten di Sumba untuk mendirikan FPPS sebagai perwujudan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah platform yang efektif bagi pemerintah daerah di Sumba untuk mengadvokasi pemerintah nasional tentang masalah dan kebutuhan pendidikan di Sumba. Forum ini juga menciptakan gerakan simultan untuk mengatasi masalah pendidikan di Sumba dengan menerapkan strategi serupa, sebagai berikut.

1. Semua kabupaten di Sumba telah menunjuk guru yang berpengalaman untuk mengajar siswa di kelas satu hingga tiga. Para guru memiliki pengalaman yang luas dan kompetensi khusus yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi di antara siswa di kelas awal.
2. Semua kabupaten di Sumba telah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, dan untuk memperkuat KKG.
3. Forum ini juga memiliki program pertukaran guru yang memberikan kesempatan belajar bagi guru di empat kabupaten di Sumba.
4. Forum ini juga memfasilitasi audiensi antara pemerintah daerah di Sumba dan pemerintah nasional untuk mengadvokasi masalah pendidikan di Sumba. Misalnya, agenda selama audiensi terakhir dengan Departemen Pendidikan terdiri dari:

- a. Advokasi Kementerian Pendidikan untuk membentuk program pendidikan guru di tingkat sekolah menengah atas;
- b. Memberi masukan kepada pemerintah nasional bahwa penerapan peraturan nasional 2010 yang memberi pemerintah daerah hak untuk menarik guru PNS dari sekolah swasta, dapat berimplikasi pada kualitas pendidikan di sekolah swasta. Kebijakan ini dianggap tidak pantas di Sumba karena kabupaten bergantung pada sekolah swasta untuk menyediakan akses pendidikan di beberapa daerah;
- c. Mengadvokasi pemerintah nasional untuk memberikan kesempatan kepada penduduk setempat untuk dipilih dalam program GGD;
- d. Meminta pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan yang menyatakan moratorium untuk mempekerjakan guru tetap untuk mengatasi kekurangan guru di Sumba.

Pemetaan kebijakan di empat kabupaten di Sumba

Studi ini ini berupaya memetakan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba.

1. Kebijakan Pendanaan Pendidikan

- i. Studi ini menemukan dua hal berbeda mengenai kebijakan Pemerintah Daerah tentang pendanaan pendidikan. Beberapa pemangku kepentingan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah telah mengalokasikan 20 persen dari APBD mereka untuk sektor pendidikan. Namun, banyak pemangku kepentingan lokal mengakui bahwa pemerintah daerah tidak mematuhi UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Amandemen UU Ketiga mewajibkan mereka untuk mengalokasikan 20 persen dari pengeluaran anggaran mereka untuk pendidikan. Juga, cara penghitungan anggaran pendidikan yang bermacam-macam menjelaskan mengapa pemangku kepentingan lokal di kabupaten yang sama memiliki jawaban berbeda untuk pertanyaan pendanaan pendidikan. Jika pemangku kepentingan lokal mempertimbangkan total anggaran pendidikan termasuk transfer daerah dan alokasi PAD untuk pendidikan, maka itu akan mencapai 20 persen dan mereka dapat mengatakan bahwa Pemerintah Daerah telah memenuhi kewajiban mereka dalam hal pendanaan pendidikan. Sementara itu, jika anggaran untuk pendidikan hanya dialokasikan dari Pendapatan Asli Pemerintah Daerah, tanpa mencakup transfer daerah, tidak ada kabupaten di Sumba yang memenuhi 20 persen kewajiban alokasi mereka untuk sektor pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 sebelumnya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dana pendidikan di empat kabupaten di Sumba sangat bergantung pada transfer daerah.
- ii. Tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendanaan pendidikan dari PAD adalah: (1) rendahnya Pendapatan Asli Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mendanai program pemerintah; dan (2) anggaran terbatas memaksa pemerintah daerah untuk mengalokasikan uang untuk sektor pembangunan sesuai dengan prioritas mereka.
- iii. Salah satu pemangku kepentingan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menghadapi tantangan lain yaitu informasi yang tidak konsisten dari kepala sekolah dan DAPODIK tentang kebutuhan sekolah. Berdasarkan DAPODIK, sekolah-sekolah tertentu memiliki infrastruktur yang memadai tetapi kepala sekolah memberikan informasi yang bertentangan selama pertemuan perencanaan pembangunan. Ini menunjukkan masalah yang terkait dengan keakuratan data DAPODIK dimana sekolah dimaksudkan untuk mengelola dan memperbarui data sehubungan dengan keadaan sekolah mereka. DAPODIK mencakup informasi tentang guru, siswa, sarana dan prasarana sekolah yang digunakan sebagai dasar untuk menyalurkan manfaat dan bantuan sosial ke sekolah. Pemangku kepentingan lokal melaporkan bahwa DAPODIK tidak diperbarui, mengakibatkan pemotongan anggaran pemerintah nasional pada dana untuk alokasi khusus yang terutama digunakan untuk infrastruktur sekolah. Ini berimplikasi pada prioritas Pemerintah Daerah dalam mengembangkan infrastruktur, termasuk untuk pendidikan.

- iv. Terlepas dari perbedaan perspektif tentang 20 persen dana Pemerintah Daerah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, anggaran jelas memengaruhi prioritas pemerintah dalam pengembangan pendidikan. Sebagian besar pemangku kepentingan mengakui bahwa sebagian besar anggaran pendidikan dihabiskan untuk gaji guru, diikuti dengan sarana dan prasarana sekolah. Sebagian kecil dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru. Studi ini mengungkap tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menggunakan anggaran pendidikan pada aspek kualitas. Pertama, ketika sebagian besar dana pendidikan berasal dari transfer daerah, sebagian besar digunakan untuk gaji guru, sarana dan prasarana yang merupakan tujuan dana transfer daerah. Karena itu, sulit bagi pemerintah daerah untuk fokus pada aspek kualitas pendidikan tanpa meningkatkan alokasi anggaran. Realokasi anggaran pendidikan meningkatkan pendanaan pendidikan dari Pendapatan Asli Pemerintah Daerah. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan mungkin sulit dicapai tanpa menerapkan kebijakan dan strategi efektivitas biaya. Situasi ini menunjukkan perlunya untuk menganalisis lebih lanjut efektivitas-biaya dalam kebijakan pendidikan di empat kabupaten untuk mengidentifikasi sumber-sumber potensial pendanaan tambahan (atau realokasi anggaran pendidikan) untuk aspek-aspek kualitas pendidikan.
- v. Masalah ketiga muncul di Sumba Barat di mana pemangku kepentingan menyarankan bahwa staf di Dinas Pendidikan Kabupaten mungkin tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan program yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga ini akan menjadi tantangan. Karena itu, penting untuk mengadvokasi pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran pendidikan mereka untuk program-program ini. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi model praktik terbaik daerah yang dikembangkan melalui INOVASI dan karenanya memperkuat program Dinas Pendidikan Kabupaten untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba. Seorang informan dari Dinas Pendidikan di Sumba Barat menyatakan minatnya terhadap ide ini selama wawancara.
- vi. Di Sumba Timur, pemerintah telah mengalokasikan BOSDA sebagai hibah tambahan untuk sekolah untuk mengisi kesenjangan antara hibah BOS yang diterima sekolah dan biaya operasional aktualnya.

2. Kebijakan tentang guru dan kepala sekolah

- i. Pemerintah Daerah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi kekurangan guru dan untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2.
- ii. Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah berwenang merekrut, menempatkan, dan mendistribusikan praktisi pendidikan berdasarkan kebutuhan. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan distribusi guru, Dinas Pendidikan Kabupaten memetakan distribusi guru untuk mengembangkan strategi penempatan guru.
- iii. Bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi guru di Pulau Sumba, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana untuk menyediakan pembelajaran jarak jauh bagi para guru. Mereka juga menyediakan dana APBD bagi para guru untuk meningkatkan kualifikasi mereka melalui Universitas Terbuka Indonesia melalui pembelajaran jarak jauh. Meskipun ada strategi pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan guru, beberapa orang yang diwawancarai mengamati bahwa kualitas pembelajaran jarak jauh yang ditawarkan dipertanyakan. Tampaknya program pembelajaran Universitas Terbuka tidak efektif karena dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, mengandalkan pembelajaran mandiri guru, dan sedikit menekankan pada praktik, yang sebenarnya penting bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka.
- iv. Sejak 2017, pemerintah Sumba Barat telah berusaha mengatasi kekurangan guru dengan memberikan beasiswa bagi kaum muda di Sumba Barat untuk mendaftar dalam program pendidikan tinggi dan gelar guru. Strategi ini seharusnya memiliki dampak positif pada kualitas pendidikan di Sumba Barat dalam jangka panjang karena masyarakat setempat dapat menjadi guru yang berkualitas. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 6 miliar dari APBD untuk mendanai program ini. Pemerintah juga bertujuan untuk membuat nota kesepahaman dengan universitas untuk mendukung program ini, khususnya dengan Universitas Petra. Namun, kurangnya dukungan berupa peraturan menghambat pemerintah untuk mengimplementasikan program tersebut pada tahun 2017. Oleh karena itu, pada tahun 2017, dengan

dukungan dari *Save the Children*, pemerintah memprakarsai peraturan daerah tentang pendidikan untuk mengakomodasi program beasiswa serta masalah pendidikan lainnya. Program beasiswa diharapkan akan dilaksanakan pada tahun 2018.

- v. Pemerintah daerah di Sumba juga telah mengalokasikan dana anggaran dan melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kompetensi guru dan praktisi pendidikan melalui kelompok kerja untuk guru SD, guru mata pelajaran dan guru kejuruan (KKG, MGMP dan MKKS). Dinas Pendidikan Kabupaten mengimplementasikan program-program ini di tingkat kabupaten sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan (No. 19 tahun 2005), UU No. 13 tahun 2007 tentang kepala sekolah dan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru yang mewajibkan pemerintah untuk mendukung program tersebut. Terlepas dari dukungan pemerintah, masih ada beberapa masalah dalam mengimplementasikan program ini. Pertama, efek pelatihan terhadap praktik guru di kelas tidak dipantau. Kedua, terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program menyebabkan hanya sedikit guru yang terlibat di tingkat kabupaten. Ini berarti bahwa guru yang telah dilatih di tingkat kabupaten harus memfasilitasi transfer pengetahuan mereka ke guru lain melalui pertemuan KKG. Ketiga, pelatihan ini terutama berfokus pada mata pelajaran untuk ujian nasional dan menerapkan Kurikulum 2013. Kendala anggaran memaksa Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan topik-topik ini. Lebih lanjut, para pelatih cenderung menggunakan metode pengajaran yang tidak efektif (pengajaran satu arah) yang berdampak negatif pada hasilnya. Studi ini menemukan bahwa program Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pelatihan guru tidak banyak menekankan pada peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi anak-anak.

Tabel 9: Kebijakan dan program untuk meningkatkan distribusi, kualifikasi dan kompetensi guru

Kebijakan, strategi dan program	Sumba Barat Daya	Sumba Barat	Sumba Tengah	Sumba Timur
Memetakan distribusi guru untuk mengembangkan strategi penempatan guru untuk mengatasi kekurangan guru	✓	✓	✓	✓
Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan guru atau memfasilitasi guru menghadiri pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi guru	✓	✓	✓	✓
Mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kegiatan kelompok kerja guru, termasuk di KKG, MGMP, KKKS	✓	✓		✓
Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi guru melalui program Universitas Terbuka Indonesia	✓		✓	✓
Memberikan anggaran bagi guru untuk mendaftar dalam program pendidikan guru profesional		✓		
Memberikan beasiswa bagi kaum muda untuk mendaftar dalam program pendidikan dan pengajaran		✓		

3. Kebijakan untuk meningkatkan hasil ujian nasional dan kompetensi literasi dan numerasi

Di tingkat provinsi, Nusa Tenggara Timur memiliki kebijakan yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012 tentang program 'Gong Belajar' yang mendorong orang tua dan masyarakat untuk memantau waktu belajar anak-anak di sekolah dan di rumah. Program enam bulan tersebut mewajibkan semua sekolah

untuk menyediakan kelas persiapan untuk siswa kelas enam sebelum ujian nasional. Program ini menerima dukungan dari dana BOS, komite sekolah dan orang tua. Hanya ada sedikit informasi tentang implementasi kebijakan ini kecuali di Sumba Barat Daya di mana kabupaten melaporkan bahwa kelas persiapan ujian masih dilakukan.

Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan program untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di empat kabupaten. Beberapa program berasal dari program nasional Departemen Pendidikan. Misalnya, Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengadopsi program gerakan literasi nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 21 tahun 2015. Peraturan tersebut mewajibkan setiap sekolah untuk menerapkan program individu membaca selama lima belas menit sebelum pelajaran dimulai meskipun tidak semua sekolah di Sumba telah mengadopsi kebijakan tersebut. Pemerintah daerah juga telah mengimplementasikan program nasional lainnya, termasuk menyediakan buku untuk perpustakaan sekolah dan berpartisipasi dalam kompetisi sains yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Namun, efektivitas program penyediaan buku dalam meningkatkan literasi masih dapat diperdebatkan oleh beberapa pemangku kepentingan lokal karena program ini hanya berfokus pada penyediaan buku tanpa kegiatan lebih lanjut untuk mempromosikan budaya membaca.

Selain inisiatif lokal yang berasal dari program nasional, Sumba Barat telah berfokus pada peningkatan akses anak-anak ke PAUD dan memperkuat layanan ini untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi. Menurut wawancara dengan Bappeda di Sumba Barat, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan Rp. 4 miliar untuk PAUD yang akan digunakan untuk gaji dan pelatihan untuk guru, infrastruktur dan fasilitas.

'Kami telah mengalokasikan empat miliar rupiah untuk program PAUD, di mana dua miliar rupiah digunakan untuk gaji guru PAUD, ... untuk infrastruktur, fasilitas, dan pelatihan guru PAUD ...' (wawancara informan, Sumba Barat).

'Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kami telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan semua desa untuk mendirikan sekolah PAUD. Secara total, kami memiliki 164 sekolah PAUD di Sumba Barat ... Kami memiliki pemikiran ... jika anak-anak berusia tiga hingga enam tahun dapat mendaftar dalam program PAUD, anak-anak [di kelas satu SD] akan berbeda dari yang lain yang tidak mendaftar di PAUD. Setidaknya mereka akan memiliki pengetahuan sebelumnya tentang huruf. Karena itu, kami akan mengelola program PAUD secara serius' (wawancara informan, Sumba Barat).

Selain itu, pemerintah daerah juga telah berkolaborasi dengan universitas dan lembaga untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar siswa di kelas satu hingga tiga, dan untuk mengembangkan modul pembelajaran serta kurikulum yang berfokus pada literasi dan numerasi. Di Sumba Barat Daya, pemerintah telah bekerja sama dengan Universitas Atmajaya untuk melatih para guru tentang literasi untuk siswa kelas awal. Program ini disebut 'Mengintegrasikan bahasa Indonesia dengan bahasa ibu-bahasa daerah'. Sumba Barat Daya telah melakukan uji coba program rintisan 'Kuark', di tiga SD yang mempromosikan pembelajaran interaktif berbasis konteks dan pertanyaan. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah mengembangkan kurikulum literasi untuk kelas-kelas awal pada tahun 2017 yang dipromosikan untuk digunakan di semua sekolah di kabupaten tersebut. Namun, monitoring program ini menjadi tantangan karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk latihan ini. Pemerintah Sumba Tengah telah bekerja sama dengan William Toisuta Associates (WTA) untuk melatih guru dalam praktik pengajaran yang efektif untuk literasi dan numerasi, dan untuk membantu dan memantau pengajaran mereka melalui pertemuan KKG yang difasilitasi oleh konsultan. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan minat dan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Berbagai inisiatif ini menawarkan peluang untuk menghasilkan praktik berbasis lokal untuk mengatasi masalah pendidikan di Sumba. FPPS adalah forum strategis untuk mendorong para pemangku kepentingan lokal untuk berbagi, belajar dan mempromosikan praktik-praktik lokal terbaik untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Sumba.

Tabel 10: Inisiatif lokal untuk meningkatkan literasi dan numerasi

Program lokal	Sumba Barat Daya	Sumba Barat	Sumba Tengah	Sumba Timur
Pemerintah Daerah menugaskan guru yang berpengalaman untuk mengajar kelas satu hingga tiga	✓	✓	✓	✓
Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengadopsi program nasional tentang literasi yang mewajibkan setiap sekolah untuk menerapkan membaca 15 menit sebelum pelajaran	✓	✓	✓	✓
Olimpiade Sains yang merupakan program nasional	✓	✓	✓	✓
Mengalokasikan APBD untuk buku-buku perpustakaan sekolah di bawah item anggaran tentang 'mengembangkan budaya membaca dan bimbingan perpustakaan'	✓	✓	✓	✓
Melakukan penelitian dan pelatihan untuk guru kelas satu dan dua tentang literasi dan numerasi dengan Universitas Atmajaya	✓			
Mengujicobakan program rintisan Kuark di tiga SD untuk mempromosikan konteks dan pengajaran dan pembelajaran berbasis penyelidikan	✓			
Meningkatkan partisipasi anak dalam PAUD dan meningkatkan kualitas PAUD		✓		
Membentuk tim layanan kurikulum untuk mengembangkan kurikulum literasi			✓	
Menyewa konsultan pendidikan (WTA) untuk mengembangkan program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas literasi dan numerasi			✓	

4. Kebijakan untuk mengurangi dampak upacara adat pada pendidikan anak-anak

Sumba Barat

Pemerintah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dua tahun lalu untuk meneliti dampak upacara adat terhadap pendidikan anak-anak di Sumba Barat. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah mendorong masyarakat di kabupaten untuk menyederhanakan praktik seremonial mereka karena praktik mahal ini akhirnya berdampak negatif pada pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah bertujuan untuk memprakarsai peraturan daerah tentang 'hidup hemat' untuk membatasi jumlah hewan kurban dan jumlah hari yang diperlukan untuk upacara adat ini.

Sumba Tengah

Pemerintah telah meluncurkan hukum adat yang disebut 'tiga gerakan moral', yang terdiri dari gerakan kembali ke ladang, gerakan desa aman dan gerakan hidup hemat. Hukum adat ini dibentuk untuk menanggapi masalah sosial, khususnya untuk 'kecenderungan mengabaikan penanaman ladang kosong, kecenderungan untuk secara keliru menafsirkan nilai-nilai budaya yang mengarah pada gaya hidup hedonistik, serta masalah keamanan yang signifikan' (Ratau et. al, 2012). Hukum adat juga memasukkan sanksi sebagai unsur penegakan hukum. Ini dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk mempromosikan perubahan sosial di Sumba Tengah.

Lima desa di Sumba Tengah telah memprakarsai peraturan desa untuk mengurangi tingkat ketidakhadiran siswa karena anak-anak bekerja dengan orang tua mereka dan membantu dalam upacara adat. Peraturan tersebut, diluncurkan pada Maret 2018, bertujuan untuk memberdayakan orang tua dan masyarakat untuk memantau partisipasi anak-anak di sekolah dan untuk mendukung pendidikan mereka.

Pembahasan

Bagian ini menjelaskan hasil baseline tentang kebijakan dan program pemerintah daerah saat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di empat kabupaten di Sumba. Secara keseluruhan, kebijakan dan intervensi pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tiga masalah prioritas utama yang oleh para pemangku kepentingan lokal dalam studi ini dianggap mendesak untuk diatasi. Studi ini menemukan beberapa kesamaan di empat kabupaten sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dengan mengalokasikan anggaran dan melaksanakan program untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru.

Selain meningkatkan kualitas guru saat ini di Sumba Barat, pemerintah menerapkan kebijakan beasiswa untuk lulusan sekolah menengah setempat untuk mengejar gelar dalam pendidikan dan mendaftar dalam program pengajaran. Walaupun kebijakan tersebut mungkin tidak memiliki implikasi langsung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pendidikan dasar, kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas lokal dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang.

Kebijakan dan program umum untuk meningkatkan literasi dan numerasi di empat kabupaten telah diturunkan dari program pendidikan nasional, termasuk program nasional tentang literasi, kompetisi sains, dan menyediakan buku untuk perpustakaan sekolah. Namun, ada juga perbedaan dalam kebijakan pemerintah daerah tentang masalah literasi dan angka. Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah telah berfokus pada peningkatan kompetensi guru terkait dengan literasi dan numerasi, bekerja dalam kolaborasi dengan universitas atau lembaga lain. Pada saat yang sama, Dinas Pendidikan di Sumba Tengah meningkatkan proses pembelajaran di kelas satu hingga tiga dengan mengembangkan kurikulum untuk literasi dan numerasi. Sementara itu, Sumba Barat berfokus pada peningkatan pengetahuan awal peserta didik melalui program PAUD. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak memiliki pengetahuan awal tentang literasi dan numerasi ketika mereka mendaftar di pendidikan dasar dan dengan demikian mempercepat kemajuan mereka. Keragaman inisiatif tersebut menunjukkan adanya peluang untuk menghasilkan praktik-praktik lokal. INOVASI dapat menggunakan FPPS untuk mendorong aktivitas berbagi, belajar dan mempromosikan praktik-praktik lokal terbaik untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Sumba.

Keterbatasan beberapa program pelatihan guru memberikan peluang bagi proyek INOVASI untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal dan mengembangkan serta menyumbangkan program-program percontohan untuk meningkatkan kompetensi guru di Sumba. Program percontohan untuk pelatihan guru harus menekankan kompetensi guru yang akan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di antara siswa di kelas satu hingga tiga.

Studi ini menyoroti pelajaran yang dipetik dari tantangan dalam menerapkan kurikulum literasi dan numerasi di Sumba Tengah. Kurangnya dukungan kebijakan lokal menciptakan hambatan bagi pemerintah yang ingin mengadopsi dan mengalokasikan anggaran untuk inisiatif baru. Oleh karena itu, proyek rintisan dan advokasi untuk menghasilkan kebijakan lokal harus dikembangkan pada saat yang sama ketika program rintisan INOVASI sedang dilaksanakan. Berkenaan dengan model multibahasa untuk pengajaran yang INOVASI akan bantu kembangkan, UU No. 20 tahun 2003 menjabarkan kebijakan nasional yang dapat berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mendukung inisiatif tersebut. Undang-undang ini memungkinkan diversifikasi kurikulum di Indonesia berdasarkan konteks lokal (Pasal 38 ayat [2]) dan penggunaan bahasa daerah untuk pengajaran selama fase awal pendidikan (Pasal 33 ayat [2]). Namun undang-undang tersebut perlu dimasukkan dalam peraturan kabupaten untuk memberikan kerangka hukum dalam mengalokasikan anggaran dan melaksanakan program. Demikian juga, tindakan advokasi diperlukan untuk menetapkan peraturan daerah yang mendukung pengembangan program untuk meningkatkan kualitas guru untuk memastikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten dapat dengan mudah mengadopsi program ini.

4.4 PRAKTIK TERBAIK LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR

Pemangku kepentingan lokal mengakui beberapa praktik terbaik lokal yang berkontribusi pada kualitas pendidikan. Individu, lembaga dan pemerintah desa telah menerapkan berbagai praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anak dalam literasi dan numerasi.

1. Beberapa pemangku kepentingan lokal mengidentifikasi manajemen berbasis sekolah sebagai praktik terbaik yang dipromosikan UNICEF di Sumba. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen sekolah dan dengan demikian meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Meskipun keberlanjutan pendekatan ini dipertanyakan di kabupaten-kabupaten di Sumba, pemerintah daerah Sumba Barat telah mengalokasikan anggaran untuk mengimplementasikan pendekatan ini mengingat potensinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten tersebut. Meskipun satu studi menemukan bahwa manajemen berbasis sekolah di Indonesia memiliki tingkat keberhasilan yang terbatas terkait perubahan signifikan dalam praktik sekolah dan prestasi siswa, hal itu masih dianggap praktik yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Vernez 2012).
2. Desa Malatak di Sumba Barat mendirikan perpustakaan menggunakan dana desa.
3. *Save the Children* mengimplementasikan program 'Pos Baca' untuk meningkatkan literasi anak-anak di beberapa desa di Sumba Tengah dan Sumba Barat pada 2017.
4. Seorang guru di Sumba Tengah telah mempromosikan akses ke pendidikan tinggi di antara anak-anak dan keluarga dari kasta hamba. Hal ini mengakibatkan banyak anak dari kasta ini mampu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atau bahkan gelar sarjana. Guru tersebut menggunakan pertemuan orang tua dan mengundang 'tuan' mereka untuk meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi akses yang setara pada pendidikan untuk anak-anak dari kasta hamba.
5. Pada 2017 beberapa guru di Sumba Tengah mendirikan perpustakaan pribadi yang dapat diakses oleh banyak orang di komunitas mereka. Mereka menggunakan rumah mereka sendiri untuk mendirikan perpustakaan yang buka dua kali seminggu. Mereka telah menciptakan gerakan untuk mengumpulkan buku-buku bekas dari masyarakat dan dari tempat lain untuk meningkatkan jumlah koleksi buku. Mereka juga menerima sumbangan buku dari orang-orang di Pulau Jawa.

4.5 PROFIL DAN ANALISIS SITUASI KELOMPOK KERJA GURU YANG DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Indonesia membentuk Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesional guru. Ini termasuk KKG SD berdasarkan gugus SD, dan KKG sekolah menengah yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) berdasarkan gugus sekolah menengah. Kelompok kerja ini adalah forum belajar di mana para guru dapat berbagi informasi, metode pengajaran, pengalaman dan alat belajar. Selain KKG tingkat sekolah, ada Pusat Kegiatan Gugus - PKG. Kelompok kerja serupa telah dibentuk untuk kepala sekolah, yang disebut K3S.

Analisis situasi KKG dalam studi ini menunjukkan bahwa kegiatan mereka telah meningkat sejak studi ACDP (2016) menemukan bahwa KKG di Sumba tidak aktif atau stagnan. Sementara KKG tingkat sekolah pada umumnya tetap tidak aktif, sebagian besar gugus kecamatan sekarang melakukan kegiatan setidaknya dua kali setahun. Beberapa gugus bahkan melakukan pertemuan setiap dua bulan. Pemangku kepentingan lokal menyoroti perbedaan kualitas di antara KKG ini, tetapi hal ini ditentukan oleh kualitas komite mereka yang perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan rencana yang jelas. Pemangku kepentingan lokal menggambarkan beberapa kegiatan KKG, misalnya: pelatihan guru untuk mengembangkan alat pembelajaran; evaluasi kinerja guru; evaluasi penggunaan bahan ajar; meluncurkan Kurikulum 2013; dan kegiatan serupa lainnya. KKG juga mengundang narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Satu pemangku kepentingan memberikan contoh KKG yang berkualitas baik:

'KKG di Madidi Palagugus dasar di gugus Madidi Palamedu... memiliki jadwal rutin untuk melakukan kegiatan di tingkat kecamatan. Mereka memiliki jadwal untuk membahas masalah-masalah khusus dalam pertemuan reguler. Misalnya, mereka telah mengembangkan konten pembelajaran, rencana pelajaran dan program lainnya (terkait dengan proses belajar mengajar) dengan semua perwakilan sekolah di gugus. Mereka bahkan mendiskusikan penganggaran sekolah' (Kepala Divisi Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah).

Karena KKG SD dan mata pelajaran adalah program pemerintah, semua sekolah wajib mengalokasikan dana anggaran dari BOS untuk mendukung mereka. Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengalokasikan dana dari APBD untuk memperkuat program KKG, kecuali Sumba Tengah. Sumba Tengah tidak mengalokasikan anggaran untuk KKG pada tahun 2018 karena prioritas lain, yaitu program pelatihan Kurikulum 2013. Sumba Tengah berencana untuk mendukung KKG pada tahun 2019. Anggaran dari APBD digunakan untuk mendanai kegiatan KKG di tingkat kecamatan dan kabupaten yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

Studi ini juga mengidentifikasi beberapa organisasi dan LSM yang telah mengimplementasikan program melalui KKG untuk meningkatkan kualitas guru. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi ini dan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat KKG telah secara signifikan meningkatkan kualitas kelompok-kelompok ini.

Evaluasi kegiatan KKG belum optimal

Meskipun KKG sekarang aktif di semua kabupaten, narasumber yang diwawancarai menyatakan adanya sejumlah tantangan dalam mencapai tujuan KKG.

1. Permasalahan peserta:
 - a. Banyak guru menghadapi tantangan dalam menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang mereka peroleh melalui KKG karena kurangnya literasi komputer. Misalnya, sebagian besar guru masih menulis rencana pembelajaran mereka secara manual.
 - b. Beberapa guru menganggap keterlibatan mereka dalam KKG hanya sebagai formalitas untuk mengkonfirmasi partisipasi mereka dalam program dan hal ini memengaruhi motivasi dan konsentrasi mereka selama kegiatan.
 - c. Tingkat kompetensi dan kebutuhan guru tidak dipertimbangkan ketika menentukan siapa yang harus menghadiri kegiatan KKG. Oleh karena itu, guru yang sama cenderung dipilih setiap kali KKG. Seorang peserta dalam diskusi kelompok terarah menyarankan agar kepala sekolah mengidentifikasi kompetensi guru di sekolah mereka dan memprioritaskan guru dengan kompetensi rendah untuk menghadiri kegiatan KKG.
2. Anggaran yang terbatas memengaruhi jumlah guru yang dapat terlibat dalam kegiatan KKG. Selain itu, kurangnya insentif dalam hal biaya transportasi membuat guru tidak dapat menghadiri kegiatan, terutama bagi guru dari daerah terpencil.
3. Permasalahan program:
 - a. Kegiatan KKG lebih menekankan pada aspek administrasi seperti dalam hal mengoordinasikan, mengonsolidasikan jadwal dan mempersiapkan ujian semester dan nasional. Mereka juga fokus pada pelatihan guru tentang Kurikulum 2013.
 - b. Metode pelatihan dan diskusi yang digunakan dalam kegiatan KKG tidak selalu kondusif untuk proses pembelajaran atau tidak mendorong semua peserta untuk terlibat penuh dalam diskusi. Durasi sesi pelatihan sering dianggap terlalu singkat untuk memberi guru waktu yang cukup untuk memahami konten.
 - c. Efektivitas KKG dalam meningkatkan kualitas guru tidak terpantau dengan baik. Kegiatan KKG perlu memiliki keluaran yang jelas yang dapat diukur dan dipantau untuk mengevaluasi efektivitasnya. Selain itu, kepala sekolah tidak memantau peningkatan kompetensi atau praktik guru setelah kegiatan KKG.
 - d. Kegiatan KKG biasanya dilakukan pada hari kerja yang memengaruhi waktu belajar dan mengajar di sekolah. Beberapa peserta menyarankan bahwa kegiatan KKG harus dilakukan selama liburan sekolah.

4.6 PERENCANAAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN MELALUI MUSRENBANG DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian ini menjelaskan bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah mendiskusikan dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan dalam perencanaan pemerintah, khususnya dalam musrenbang. Kami menggali proses perencanaan pembangunan melalui wawancara dan diskusi, dan bagian ini melaporkan pengamatan peserta diskusi. Bagian ini juga menggali perspektif dan praktik para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran desa untuk mendukung pendidikan di Sumba, berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, UU No. 60 tahun 2014 tentang kebijakan anggaran desa dan Peraturan Kementerian Keuangan No. 49 / PMK.07 / 2016 tentang prosedur untuk alokasi, distribusi, penggunaan, monitoring dan evaluasi anggaran desa.

Forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan

Ada beberapa perdebatan tentang seberapa efektif musrenbang dapat mengakomodasi perencanaan partisipatif. Beberapa orang melihat musyawarah ini sebagai proses pengambilan keputusan dari bawah ke atas yang mendukung aspirasi masyarakat. Namun, ada yang menganggap proses itu hanya sebagai formalitas dengan pendekatan yang bercokol pada kelanjutan perencanaan pembangunan. Salah satu peserta mengatakan bahwa meskipun tampaknya pertemuan musrenbang merupakan proses sinkronisasi bagi program pemerintah melalui audiensi dengan masyarakat, namun semua keputusan tentang prioritas pembangunan telah dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan dalam musrenbang. Kami mengamati musrenbang di Kecamatan Loli.

Peserta dalam musrenbang untuk sektor pendidikan di tingkat kabupaten terutama adalah delegasi dari sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah, yang ditunjuk oleh penduduk desa untuk menghadiri musyawarah tersebut. Pemerintah juga mengundang delegasi dari asosiasi guru, dewan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten di Sumba Barat ke musyawarah tersebut. Tampaknya delegasi sekolah dipilih untuk menjadi peserta dalam musrenbang kecamatan karena proposal mereka terkait lima prioritas teratas berdasarkan musrenbang desa. Delegasi sekolah diharapkan dapat menang dalam proses diskusi pada pertemuan perencanaan pembangunan kecamatan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terwakili dalam pertemuan ini.

Sebelum diskusi, perwakilan dari Bappeda di Sumba Barat menempelkan ringkasan lima prioritas utama kebutuhan pendidikan dari semua desa di kecamatan di dinding, sehingga semua peserta dapat terlibat dalam diskusi forum. Ringkasan ini mencakup informasi tentang kebutuhan pendidikan tetapi tidak ada rincian tentang sekolah mana yang diwakili dalam ringkasan (lihat gambar 1 dan 2). Gambar 1 dan 2 jelas menunjukkan bahwa fokus utama perencanaan sektor pendidikan di semua desa adalah untuk memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pendidikan. Masyarakat menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap aspek kualitas pendidikan, seperti yang diamati oleh satu pemangku kepentingan:

'Dari banyak pertemuan perencanaan pembangunan yang saya hadiri, aspirasi tentang peningkatan kualitas pendidikan sangat jarang tetapi orang cenderung berfokus pada infrastruktur. Aspirasi ini bahkan disuarakan oleh para guru ... sehingga pola pikir mereka masih fokus pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.' (perwakilan dari Bappeda, Sumba Barat).

Gambar 1. Rekapitulasi usulan dari semua desa untuk sector pendidikan di Kecamatan Loli

**REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
UNTUK PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2019**

KECAMATAN : LOLI
KABUPATEN : SUMBA BARAT
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang PIM (Pendidikan)	Lokasi	Desa/ Kelurahan	Volume	Satuan	Indikator dan Parameter											Jumlah	Rangking	Prioritas
						I	II	III	IV	V	VI	7	8	9	10	11			
1. PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG/ PAKAR SEKOLAH BARU																			
1.1.	Pembangunan Gedung :																		
*	Pembangunan TK Baru	SD Kabenera	Sobewaw	1	Pkt													P3	
*	Pembangunan Gedung Paud	Paud Meati	Sobewaw	1	Pkt													P6	
*	Pembangunan Paud, Tenaga Pengajar, Jelempapan APE	Weeselin	Weekarou	1	Pkt													P5	
*	Pembangunan Lanjutan Gedung SMA	SMA di Bodo Kameti	Loda Pare	1	Pkt													P5	
*	Pembangunan Paud terintegrasi dengan posydu	PAUD Krt. Weedabo	Weedabo	2	Pkt													P2	
*	Pembangunan SD Pabel	SD Pabel - Pabelwada	Tana Tana	1	Pkt													P1	
*	Pembangunan Gedung SMA N1 Loli	SMA N1 Loli	Doka Kaka	1	Pkt													P1	
*	Pembangunan TK	SD Lomana padaji	Ubu Raya	1	Pkt													P1	
*	Lanjutan Paud Eten dan Pangedan seragam Paud	Dusun II	Ubu Raya	1	Pkt													P6	
*	Pembangunan Kantor Balade	Baladey	Manca	1	Pkt													P3	
				8 Desa/Kelurahan	11 Paket														
1.2. Pembangunan Ruang Kelas / Kantor:																			
*	Pembangunan Gedung	Ruang Kelas SEM Waikabubak II	Dita Tana	1	Unit													P2	
*	Penambahan Ruang Kelas SMPN3	SMPN3 LOLI	Weekarou	2	unit													P1	
*	Penambahan Ruang Kelas di SD Wee Karou	SDN Wee Karou	Loda Pare	1	Unit													P1	
*	Pembangunan Ruang SMA SD Desa Ebu	SD Desa Ebu - Dusun II	Deda Kadu	3	Unit													P1	
*	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SD Desa Ebu	SD Desa Ebu - Dusun II	Deda Kadu	1	Unit													P6	
*	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pawaeni	SD Pawaeni	Beradolu	3	Unit													P4	
*	Penambahan bangunan Paud	Pua Ligita	Ubu Raya	1	Unit													P5	
				8 Desa/Kelurahan	12 Unit														
1.3. Pembangunan Aula :																			
*	Pembangunan Aula SMP N LOLI	SMP N LOLI	Tana Tana	3	Unit													P3	
*	Pembangunan Aula SMP N1	SMP NEGERI I	Doka Kaka	1	Unit													P2	
*	Pembangunan Aula SMP N1	SMP N1 LOLI	Doka Kaka	1	Unit													P1	
*	Pembangunan Aula SMP N 4 Loli dan SCM Pangadu Rade	Dusun II	Ubu Pede	2	unit													P1	
				3 Desa/Kelurahan	7 Unit														

Gambar 2. Ringkasan lima besar prioritas kebutuhan pendidikan dari semua desa

BIDANG PENDIDIKAN

Kec. Kota Waikabubak
Bidang Pendidikan

No	Usulan Rencana Kegiatan	Volume	Desa/ Kelurahan	Indikator dan Parameter											Jumlah	Rangking	Prioritas	
				I	II	III	IV	V	VI	7	8	9	10	11				12
1.1	PEMBANGUNAN GEDUNG	5 PAKET	4															
1.2	PEMBANGUNAN RUANG KELAS/KANTOR	16 UNIT	6															P3
1.3	PEMBANGUNAN AULA	3 UNIT	2															P1
1.4	REHAB. RUMAH	2 UNIT	2															P1
1.5	REHAB. MET. RUMAH	3 UNIT	2															P1
1.6	REHAB. MET. RUMAH	3 UNIT	2															P1
1.7	REHAB. BAGAS. HAL. SEKOLAH	3 PAKET	5															P2
1.8	PENGADAPAN MELU BELE	10 PAKET	8															P2
1.9	PENGADAPAN PASUKAN TERAKAM	6 PAKET	6															P2
1.10	PENGADAPAN INKOKUC	1 UNIT	1															P2
1.11	PENGADAPAN A.P.D. DALAM/LUAR	7 PAKET	5															P2
1.12	PENGADAPAN PERLENG. DIA. SUSA. ID. BUAH	1 UNIT	1															P2
1.13	PENYARAFAN TENAGA GURU/SD. 24 ORANG	4	4															P2
1.14	PENYARAFAN TENAGA PAUD. 10 ORANG	4	4															P2
1.15	PENYARAFAN PENYAGA SMP/SL. 2 ORANG	1	1															P2
1.16	DIK. LAT. GURU/ TENOR. 2 SUSA. 10 ORANG	4	4															P2
1.17	BEASISWA BAGI TENOR. 2 SUSA. 100 ORANG	7	7															P2
1.18	INSENTIF GURU/ TENOR.	100 ORANG	5															P2
1.19	BANTUAN PAKET A. B. R.C.	100 ORANG	5															P2

Berdasarkan pengamatan proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Loli di Sumba Barat, ada sedikit ruang untuk secara terbuka mendiskusikan kebutuhan pendidikan. Proses diskusi tampak lebih seperti persaingan antar kepentingan. Proses ini menyediakan sedikit ruang untuk perundingan di balik kebutuhan sebagaimana tercantum dalam ringkasan, seperti mengapa kebutuhan tertentu harus diprioritaskan daripada yang lain. Proses diskusi berfokus pada daftar prioritas tanpa menawarkan bukti pendukung (data) atau alasan yang jelas untuk menentukan urgensi setiap proposal. Butuh sekitar tiga puluh menit untuk memutuskan sepuluh besar prioritas kebutuhan pendidikan untuk Kecamatan Loli. Tidak ada perbedaan terkait keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam diskusi. Peran delegasi dari Dinas Pendidikan lebih untuk mengamati daripada terlibat dalam diskusi. Setelah pertemuan tingkat kabupaten, Bappeda melakukan survei terhadap sekolah-sekolah yang proposal-proposalnya termasuk di antara prioritas utama untuk program pemerintah dalam sektor pendidikan. Survei ini adalah pertimbangan akhir untuk memutuskan apakah proposal sekolah akan disetujui atau tidak.

Berkenaan dengan proses perencanaan pembangunan, jelas bahwa para delegasi memainkan peran penting dalam memberikan alasan dan bukti tentang kebutuhan pendidikan untuk menghasilkan diskusi yang bijaksana selama musrenbang. Masyarakat desa membutuhkan bantuan dan pemberdayaan untuk mengubah pola pikir mereka dari berfokus pada infrastruktur menjadi mempertimbangkan aspek-aspek kualitas pendidikan dalam proposal yang diajukan pada musrenbang di masa mendatang.

Dana desa

Pemangku kepentingan lokal merasa bahwa dana desa tidak dapat digunakan untuk meningkatkan kebutuhan pendidikan, kecuali untuk program PAUD, karena mereka hanya memiliki wewenang untuk mengalokasikan dana untuk area ini. Kebutuhan di tingkat SD dan menengah pertama berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten, sedangkan sekolah menengah atas berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Dana desa hanya dapat digunakan untuk seragam sekolah atau untuk menawarkan bantuan keuangan untuk pendidikan. Namun, seperti yang tercantum dalam praktik terbaik sebelumnya, Desa Malatak di Sumba Barat berhasil menggunakan dana desa untuk menyediakan perpustakaan.

Terlepas dari ruang lingkup kewenangan para pemimpin desa, mereka hanya dapat mengalokasikan dana desa untuk PAUD. Para pemangku kepentingan menyoroti beberapa kendala dalam mengakses dana desa untuk pendidikan.

1. Rencana pembangunan jangka menengah regional dan desa menghalangi pendanaan inisiatif baru dengan dana desa karena kurangnya regulasi untuk mendukung adopsi inisiatif tersebut.
2. Kurangnya data yang akurat tentang situasi pendidikan di desa berdampak pada kecilnya ruang yang disediakan untuk membahas masalah pendidikan selama perencanaan desa.
3. Disebutkan bahwa kualifikasi dan pengalaman kepala desa berdampak pada kualitas perencanaan desa.
4. Perspektif masyarakat tentang alokasi dana desa masih fokus pada sarana dan prasarana.

4.7 KEMITRAAN

1. Pelajaran dari LSM di Sumba

Sebagian besar peserta dalam studi ini mengakui bahwa LSM yang bekerja di Pulau Sumba memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Organisasi-organisasi ini dianggap mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program di Kabupaten Sumba Barat Daya. Mereka berkontribusi untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang perlunya pendidikan dan memperkuat sistem pendidikan melalui berbagai kegiatan pengembangan untuk guru, anak-anak dan orang tua. Organisasi-organisasi ini bahkan membantu menyediakan fasilitas sekolah dan membangun infrastruktur. Namun, ada beberapa pelajaran yang dipetik mengenai kelemahan pendekatan LSM.

1. Program-program LSM mungkin sulit untuk ditiru karena tidak selalu sesuai dengan fokus pembangunan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam rencana pembangunan jangka menengah regional dan desa atau dalam berbagai rencana strategis. Biasanya, tidak ada peraturan untuk mendukung pemerintah dalam mengadopsi atau mereplikasi program-program ini, sehingga tidak ada alokasi anggaran yang tersedia untuk mereplikasi program. Oleh karena itu, penting untuk memprakarsai peraturan daerah untuk memastikan program yang berkelanjutan.
2. Perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan dapat memengaruhi kolaborasi dengan LSM dan komitmen terhadap program mereka.
3. Berbagai pendekatan dan kebijakan kelembagaan berdampak pada sikap para pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap LSM dan pemangku kepentingan lokal lainnya. Misalnya, kebijakan tentang

kompensasi biaya transportasi untuk mengikuti kursus pelatihan dapat memengaruhi motivasi peserta dalam menghadiri pelatihan yang dilakukan oleh LSM atau pemerintah. Peserta lebih suka terlibat dalam kegiatan yang menawarkan kompensasi.

2. Potensi kolaborasi dengan program INOVASI

Pemerintah daerah di empat kabupaten di Sumba telah mengonfirmasi dukungan mereka untuk proyek INOVASI dengan mengalokasikan dana anggaran untuk bekerja sama dalam meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk memantau dan mereplikasi program rintisan INOVASI. Pemangku kepentingan lokal mengemukakan beberapa harapan sehubungan dengan proyek INOVASI di Sumba, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. Harapan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan pemangku kepentingan lokal dapat mengarah pada kolaborasi lebih lanjut. Studi ini juga mengidentifikasi kolaborasi potensial dengan beberapa LSM yang fokus pada pendidikan dasar di Sumba, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 11: Harapan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dengan INOVASI

No	Sumba Barat Daya	Sumba Barat	Sumba Tengah	Sumba Timur
1	Meningkatkan kualitas guru melalui KKG	Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan mengembangkan kriteria dan mekanisme untuk perekrutan kepala sekolah	Memperkuat KKG dengan fokus pada peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan literasi dan numerasi	Meningkatkan kualitas guru
2	Mengembangkan kurikulum tentang literasi dan numerasi untuk siswa di kelas satu hingga tiga	Memfasilitasi audiensi antara pembuat kebijakan di Sumba dan pemerintah pusat untuk mengadvokasi peningkatan kualitas pendidikan di Sumba		Memperkuat KKG dengan meningkatkan kapasitas fasilitator dan proses diskusi di KKG, misalnya dengan menerapkan metode adaptasi iteratif berbasis masalah
3	Tingkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan LSM	Mengembangkan kurikulum tentang literasi dan numerasi untuk siswa di kelas satu hingga tiga sehubungan dengan bahasa daerah		
		Memperkuat KKG dengan fokus pada peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan literasi dan numerasi		

Tabel 12: Pemetaan pemangku kepentingan lokal

Sumba Barat Daya	Sumba Barat	Sumba Tengah	Sumba Timur
<ol style="list-style-type: none"> ChildFund: respons tanggap darurat, sanitasi sekolah, program pendidikan kesehatan Wahana Visi Indonesia: pendidikan Donders William and Lily Foundation HIVOS: mendorong penggunaan teknologi informasi di sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> Save the Children: fokus pada PAUD, meningkatkan kompetensi guru melalui KKG, meningkatkan literasi dan numerasi, dan memprakarsai peraturan daerah terkait Pendidikan Sumba Foundation Levico – Victor Laiskodat: menyediakan buku-buku untuk sekolah Bahtera Foundation: kesehatan dan pendidikan HIVOS: memasyarakatkan energi terbarukan Yakkum (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum) fokus pada isu disabilitas. Suft Aid 	<ol style="list-style-type: none"> Sumba Foundation: area baca WTA: meningkatkan kompetensi guru, literasi dan numerasi. Save the Children: meningkatkan kompetensi guru, literasi dan numerasi YWKW: memprakarsai peraturan desa untuk meningkatkan jumlah anak bersekolah Yapmas (Yayasan Persekolahan Nusa Cendana): mengadakan pelatihan dan pemantauan pendidikan di sekolah Wahana Foundation: memiliki program untuk SMP Foremba Foundation: perlindungan anak. DBEP: infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> IOA-Alumni Luar Negeri Indonesia: menyediakan buku-buku dan membantu pelatihan guru dan kepala sekolah WVI: Pendidikan dan perlindungan anak Yaslalti Disabilities: fokus pada isu disabilitas Childfund dengan Sumba Integrated Development: masyarakat ramah anak MCAI, UNDP: pemberdayaan ekonomi Hivos: energi terbarukan

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab-bab sebelumnya menjelaskan dan mendiskusikan temuan-temuan dari studi baseline program INOVASI di Sumba ini. Kegiatan tersebut meliputi analisis data sekunder dan studi kualitatif yang melibatkan partisipasi pemangku kepentingan lokal di tingkat provinsi dan di empat kabupaten di Sumba. Bab ini menarik kesimpulan berdasarkan asesmen dan rekomendasi yang diusulkan untuk desain program INOVASI. Temuan dan rekomendasi keseluruhan dirangkum dalam Tabel 5.1.

Tabel 13: Ringkasan temuan

Masalah pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi dan kualitas guru yang rendah • Keterampilan manajerial dan pengawasan kepala sekolah yang rendah • Hasil pendidikan yang rendah terkait dengan literasi dan numerasi • Hambatan siswa untuk belajar • Akses yang tidak merata terhadap pendidikan terus ada • Kurangnya sarana dan prasarana sekolah • Faktor kontekstual yang memengaruhi kualitas pendidikan, seperti upacara adat yang mahal dan kurangnya dukungan orang tua untuk pendidikan anak-anak
Faktor pendukung (<i>enabling factors</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan nasional tersedia untuk mendukung pengembangan program guru, kurikulum yang sejalan dengan fokus proyek INOVASI • Kelompok kerja tersedia melalui FPPS • Komitmen pemerintah daerah untuk mendukung INOVASI sebagaimana dinyatakan dalam MoU • Pemerintah Daerah mengalokasikan dana anggaran untuk KKG di Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Timur. • Berbagai inisiatif lokal telah diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi • LSM lain juga bekerja di Sumba untuk menangani masalah pendidikan
Fokus untuk intervensi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas guru dan mengembangkan kurikulum dengan fokus pada literasi dan numerasi • Meningkatkan kualitas kepala sekolah dan pengawas sekolah • Memperkuat KKG sebagai forum untuk meningkatkan kapasitas guru • Memperkuat Dinas Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum dan program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi • Menetapkan peraturan daerah sebagai kerangka hukum untuk mendukung implementasi dan monitoring inisiatif lokal • Dukungan orang tua dan masyarakat untuk pendidikan • Advokasi Pemerintah Daerah untuk fokus pada anggaran dan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Studi ini menemukan bahwa kualitas pendidikan yang rendah di Sumba berasal dari rendahnya kualitas guru dan kepala sekolah yang menjalankan layanan pendidikan di Sumba. Situasi ini telah menyebabkan proses pembelajaran yang tidak efektif dan hasil pendidikan yang rendah, khususnya dalam hal literasi dan numerasi. Hambatan siswa berdampak negatif pada kemampuan siswa untuk menjadi terlibat dalam proses pembelajaran dan untuk memahami konten pembelajaran. Temuan ini menunjukkan akses yang tidak merata ke pendidikan untuk semua anak di Sumba. Anak perempuan di Sumba tetap dirugikan dalam mengakses pendidikan tinggi. Akses ke pendidikan untuk anak-anak difabel di Sumba dibatasi oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, prioritas pemerintah dan kurangnya guru yang terlatih. Selain itu, pengikut agama Marapu dan anak-anak dari kasta *ata* tetap rentan dalam sistem pendidikan di Sumba. Rendahnya dukungan dari orang tua dan masyarakat telah diakui sebagai penghalang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba.

Studi ini juga mengidentifikasi beberapa faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba. Pertama, pembentukan FPPS oleh pemangku kepentingan lokal menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi masalah pendidikan di Sumba. Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung proyek INOVASI di Sumba. Kedua, Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya telah menerapkan berbagai inisiatif lokal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Studi ini menemukan beberapa kesamaan terkait dengan kebijakan pemerintah di empat kabupaten untuk meningkatkan kualitas guru, yaitu dengan mengalokasikan dana anggaran dan melaksanakan program untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru. Selain meningkatkan kualitas guru saat ini di Sumba Barat, pemerintah menyediakan beasiswa bagi masyarakat lokal untuk mengejar gelar dalam pendidikan dan mendaftar dalam program pengajaran.

Ada kebijakan dan program umum untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di empat kabupaten dan ini berasal dari program pendidikan nasional. Namun, ada perbedaan nyata dalam inisiatif Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah fokus pada peningkatan kompetensi guru terkait literasi dan numerasi, bekerja sama dengan universitas dan lembaga lainnya. Pada saat yang sama, Dinas Pendidikan Sumba Tengah meningkatkan proses pembelajaran di kelas satu hingga tiga dengan mengembangkan kurikulum tentang literasi dan numerasi. Sementara itu, Sumba Barat berfokus pada peningkatan pengetahuan awal peserta didik melalui program PAUD.

Berkenaan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba, studi baseline ini mencatat beberapa keterbatasan dan tantangan dalam mengimplementasikan inisiatif atau kebijakan lokal. Rendahnya kualitas guru kontrak yang direkrut dan kualifikasi pendidikan yang rendah dari kandidat lokal telah berkontribusi terhadap rendahnya kualitas guru di Sumba. Program pelatihan untuk guru dianggap kurang efektif dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan di Sumba. Studi ini juga menyoroti pelajaran yang diperoleh dari tantangan dalam menerapkan kurikulum literasi dan numerasi di Sumba Tengah karena kurangnya dukungan kebijakan lokal.

Beberapa pemangku kepentingan mengenali sejumlah praktik lokal terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Studi ini juga mengidentifikasi kolaborasi potensial dengan beberapa LSM dan lembaga lain yang memiliki fokus serupa pada peningkatan kapasitas guru dan hasil pendidikan.

Berikut ini adalah saran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba, berdasarkan temuan penelitian.

Implikasi Program untuk INOVASI

1. INOVASI memiliki peluang dalam menyumbangkan program percontohan untuk meningkatkan kompetensi guru, misalnya, kurikulum untuk pelatihan guru. Program semacam itu harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan guru. Kurikulum untuk pelatihan guru perlu fokus pada peningkatan kapasitas guru untuk mengajar anak-anak di kelas satu hingga tiga untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi. Ini mungkin termasuk menerapkan metode pengajaran multibahasa yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa kedua dalam pengajaran untuk membantu anak-anak mengatasi hambatan bahasa. Menerapkan pendekatan eksperimental adalah opsi untuk membantu membangun bukti terkait efektivitas kurikulum dalam meningkatkan kompetensi guru. Asesmen guru yang akan menjadi target dalam experiment tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi mereka saat ini.
2. INOVASI dapat berkontribusi untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan literasi dan numerasi dasar sehubungan dengan bahasa daerah sebagai bahasa kedua dalam instruksi pengajaran untuk membantu mengatasi hambatan bahasa di kelas. Dalam kasus Sumba Tengah, yang sudah memiliki kurikulum literasi, INOVASI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menguji dan meningkatkan kurikulum, dan kemudian mempromosikan implementasinya di sekolah.
3. INOVASI dapat membantu mengembangkan KKG sebagai saluran yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan kapasitas komite KKG untuk mengelola dan mengembangkan program merupakan hal yang penting untuk membuat kelompok ini lebih efektif.

Kegiatan program rintisan INOVASI yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dapat dilaksanakan melalui KKG. INOVASI juga dapat mengembangkan dan mempromosikan model diskusi untuk KKG yang berfokus pada penyelesaian masalah pendidikan yang dibahas dalam forum.

4. Program INOVASI dapat memfasilitasi proses berbagi dan belajar di seluruh kabupaten terkait dengan inisiatif unik untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diterapkan di setiap kabupaten. Proses pembelajaran dapat dilakukan melalui FPPS dan menciptakan gerakan berkelanjutan untuk mendorong inovasi lokal dalam pendidikan dan mengembangkan lingkungan yang kompetitif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba. Forum ini dapat diperkuat sebagai konsorsium untuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan menangani masalah literasi dan numerasi di setiap kabupaten. Konsorsium dapat dibentuk di setiap kabupaten dengan agenda untuk mengembangkan kurikulum literasi dan numerasi serta kurikulum pelatihan guru menggunakan metode penelitian tindakan secara kolaboratif. Konsorsium tersebut dapat memberikan kesempatan untuk menggabungkan semua sumber daya lokal untuk mencapai tujuan pendidikan bersama, memperluas cakupan area dan memperkuat keberlanjutan.
5. Program INOVASI perlu membantu dan memberdayakan praktisi pendidikan dan masyarakat desa untuk mengubah pola pikir mereka dari fokus pada infrastruktur menjadi fokus ke aspek kualitas pendidikan pada proposal di masa depan dalam musrenbang

Implikasi Kebijakan

1. Berkenaan dengan empat program rintisan INOVASI, INOVASI perlu mengadvokasi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan menciptakan kerangka hukum yang mendukung inisiatif lokal untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Program yang dikembangkan oleh mitra lokal untuk meningkatkan kualitas guru serta meningkatkan tingkat literasi dan numerasi perlu dipromosikan. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana anggaran untuk berkolaborasi dan mereplikasi model proyek INOVASI di sekolah lain.
2. Analisa efektivitas biaya terkait kebijakan pendidikan di empat kabupaten perlu dilakukan untuk mengidentifikasi sumber potensial tambahan pendanaan (atau realokasi anggaran pendidikan) untuk aspek-aspek kualitas pendidikan. Mengadvokasi pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi Pendapatan Asli Pemerintah Daerah mereka untuk pendidikan akan meningkatkan alokasi anggaran untuk aspek kualitas pendidikan. INOVASI perlu terus mengadvokasi semua pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana untuk mendukung KKG dan K3S sebagai forum pembelajaran. Inisiatif Sumba Timur untuk mengalokasikan BOSDA adalah praktik lain yang akan dipromosikan di kabupaten lain.
3. INOVASI juga dapat membantu memperkuat berbagai peran staf Dinas Pendidikan Kabupaten:
 - menerapkan jaminan kualitas (quality assurance) pada pendidikan eksternal dan internal untuk memantau indikator kualitas pendidikan sesuai dengan standar nasional. Ini termasuk Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah dan pengawas sekolah yang memperkuat sistem monitoring untuk proses pendidikan di sekolah;
 - mengembangkan program yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan; dan
 - memperkuat proses monitoring untuk merekrut guru kontrak lokal dengan menetapkan persyaratan minimum yang sesuai dengan Undang-Undang tentang guru.
4. Memprakarsai hukum adat untuk mengurangi dampak upacara adat yang mahal dan praktik pekerja anak terhadap kualitas pendidikan, serta meningkatkan dukungan orang tua dan masyarakat untuk pendidikan anak-anak.

Secara umum, empat proyek rintisan yang diprakarsai INOVASI di empat kabupaten di Sumba, telah sesuai dengan fokus pemerintah daerah tentang peningkatan kualitas guru dengan memperkuat KKG dan meningkatkan literasi dan numerasi dasar di antara siswa di kelas satu hingga tiga. Temuan-temuan dalam studi baseline ini juga telah memunculkan minat pemerintah dalam mengembangkan kurikulum untuk meningkatkan literasi dan numerasi dasar, sehubungan dengan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa kedua untuk pengajaran di kelas untuk mengatasi hambatan bahasa di beberapa daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Central Bureau of Statistic (*Badan Pasat Statistik – BPS*). 2018. *Education statistics of East Nusa Tenggara 2017*. [Document in Bahasa Indonesia]. Jakarta: BPS.
- Central Bureau of Statistic (*Badan Pasat Statistik – BPS*). 2018. *Southwest Sumba in figures, 2017*. [Document in Bahasa Indonesia]. Jakarta: BPS.
- Central Bureau of Statistic (*Badan Pasat Statistik – BPS*). 2018. *Central Sumba in Figures, 2017*. [Document in Bahasa Indonesia]. Jakarta: BPS.
- Central Bureau of Statistic (*Badan Pasat Statistik – BPS*). 2018. *Welfare statistics for East Sumba, 2017*. [Document in Bahasa Indonesia]. Jakarta: BPS.
- Central Bureau of Statistic (*Badan Pasat Statistik – BPS*). 2018. *West Sumba in figures, 2017*. [Document in Bahasa Indonesia]. Jakarta: BPS.
- Chang MC, S Shaeffer, S Al-Sammarrai, AB Ragatz, J de Ree and R Stevenson. 2014. Teacher reform in Indonesia: [*the role of politics and evidence in policy making*](#). Washington DC: World Bank
- Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). 2016. *Strategies for improving basic education: school/madrasah effectiveness in Sumba Volume 1: Comprehensive situational analysis*. [Document in Bahasa Indonesia and English]. Jakarta: ACDP.
- Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). 2016. *Strategies for improving basic education: school/madrasah effectiveness in Sumba Volume 2 Knowledge to policy*. [Document in Bahasa Indonesia and English]. Jakarta: ACDP.
- Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). 2016. *Strategies for improving basic education: school/madrasah effectiveness in Sumba Volume 3: A school evaluation model focusing on student learning & modelling the implementation of teachers' working groups*. [Document in Bahasa Indonesia and English]. Jakarta: ACDP
- INOVASI 2018 baseline survey in Sumba (quantative)
- Ministry of Education and Culture, Basic Education Data (*Data Pokok Pendidikan – DAPODIK*). Primary school statistics for 2017/2018 (*Statistik Persekolahan SD 2017/2018*). Jakarta: MoEC.
- Neraca Pendidikan Daerah* (Local Education Balance Sheet), 2017
- Ratau U, I Wauran , A Siswanto , D Haptasari. 2012. *'Tiga gerakan moral sebagai hukum adat masyarakat Central Sumba'*. [Three moral movements as customary laws of the Central Sumba community] [Article in Bahasa Indonesia]. *Reflexihukum* 1(2):213–31. Available online at: <http://ejournal.uksw.edu/reflexihukum/article/download/1032/538/>
- Sumba regional office. 2017. *Neraca Pendidikan Daerah* (local education balance sheet)
- Vernez G, R Karam, JH Marshall. 2012. *Implementation of school-based management in Indonesia*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Available at: <https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1229.html>. Also available in print form.
- Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Gerakan Gong Belajar
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan

Peraturan Pemerintah tahun 2010 tentang hak pemerintah daerah untuk menarik guru-guru PNS

Peraturan daerah tentang program beasiswa pengajaran

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2001

Peraturan desa tentang pengurangan ketidakhadiran siswa.